

**ANALISIS PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR  
OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)  
KOTA BENGKULU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Pada Program Ekstensi Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Bengkulu**



**Oleh :**

**GUNAWAN PRATAMA  
NPM. D1D111038**

**PROGRAM EKSTENSI STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BENGKULU  
2017**

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- ✦ *Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keiklasan, istiqomah dalam menghadapi cobaan.*
- ✦ *Berjuang memang tidak mudah, tetapi di balik itu ada pelajaran yang tidak pernah di rasakan sebelumnya.*
- ✦ *"Karena sesungguhnya Sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain"*  
*(Qs. Al-Insyirah : 5-7)*

### Persembahan :

*Ku persembahkan karya ini untuk :*

- ✦ *ALLAH SWT yang telah memberikanku hidup, cinta, kekuatan, kesempatan dan segalanya yang baik bagiku...  
ALHAMDULILLAH, segala puji bagi ALLAH SWT...*
- ✦ *Surga kasih sayangku Ibunda Anah dan Ayahku Misnak , terima kasih telah memberikanku segalanya yang berarti dalam hidupmu, kasih sayang yang tak terhingga.*
- ✦ *Saudara-saudaraku (kakak, adik & keponakan ku) yang penulis cintai dan sayangi telah membantu penulis baik moril maupun materil yang berguna dan bermakna bagi penulis.*
- ✦ *Dosen Universitas Bengkulu khususnya ilmu administrasi negara ekstensi yang selama ini mendidik dan membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat di masa kini dan mendatang.*
- ✦ *Kawan-kawan seperjuanganku (angkatan 2011) yang selalu bersama suka dan duka, saling mendukung dan memotivasi, tolong-menolong, dan bercanda bersama, semoga kedepannya kita menjadi orang yang sukses dan tidak melupakan satu sama lain.*

## Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat

Bagian atau keseluruhan isi skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi skripsi.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 5 Januari 2017



Gunawan Pratama

## RIWAYAT PENULIS



***NAMA : GUNAWAN PRATAMA***

***TTL : Rejang Lebong 14 Januari 1993***

***Anak Ke : 1 ((satu) dari 3 (tiga) bersaudara***

***Agama : Islam***

***Ibu : Anah***





***Bapak : Misnak***

***Alamat : Jl. Sedap Malam rt 14 rw 03***







***Kelurahan Nusa Indah***

***Email : gunawanp261@gmail.com***

### PENDIDIKAN :

 SD	: SD Negeri 32 Kota Bengkulu	1998-
2005		
 SMP	: SMP Negeri 12 Kota Bengkulu	2005-
2008		
 SMK	: SMA Muhamadyah 4 Kota Bengkulu	2008-
2011		
 PT	: UNIVERSITAS BENGKULU	2011-
2017		

### PELATIHAN DAN KEGIATAN YANG PERNAH DIKUTI :

-  Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus (PKK) Universitas Bengkulu tahun 2011/2012.
-  Kegiatan MAKRAB Mahasiswa Administrasi Negara tahun 2011.
-  Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 73 tahun 2014 Universitas Bengkulu di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
-  Kegiatan Magang di PT Pertamina TBBM Pulau Baai Bengkulu tahun 2014.
-  Kegiatan Pelatihan Manajemen Organisasi HIMASTRA tahun 2015
-  Panitia kegiatan pengenalan kehidupan kampus (PKK) Non Reguler Tahun 2011

- ✚ Anggota Bidang penalaran dan keilmuan di Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara Ekstensi (HIMASTRA) Periode 2012-2013.
- ✚ Pelatihan penulisan karya tulis ilmiah HIMASTRA dengan tema “melalui pelatihan penulisan karya ilmiah kita tingkatkan intelektualitas dalam menulis” tahun 2012.
- ✚ Panitia kegiatan study tour HIMASTRA tahun 2012 ke Palembang, Sumatera Selatan.
- ✚ Seminar Nasional FISIP UNIB tahun 2013 dengan tema “ Keterkaitan Kebijakan Pembangunan Nasional Terhadap Daerah Di Era Otonomi”.
- ✚ Seminar Daerah FISIP UNIB tahun 2014 dengan tema “Legislatif Dan Pembangunan Daerah”.
- ✚ Seminar Nasional Dies Natalis ke-15 HIMA-ADMIRA FISIP UNIB pada tanggal 1 mei 2015 dengan tema “Persepsi Masyarakat Terhadap Pilkada Langsung”

## KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr. Wb...

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur penulis hanturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu dan memperoleh gelar sarjana ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan dan motivasi serta partisipasi dari semua pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Hasan Pribadi, P.hD selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan pemberi legalitas skripsi peneliti untuk tingkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Drs. Jarto Tarigan,M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara serta dosen PembimbingUtama skripsi yang memberikan masukan saran dan kritik yang membangun dalam mencari kekurangan atas naskah skripsi sehingga menyempurnakan naskah skripsi.
3. Ibu Nursanty,S.IP,.M.SiSelaku Dosen Pembimbing Pendamping yang tak kenal lelah membimbing peneliti dalam menyusun, menyelesaikan dan menyempurnakan naskah skripsi ini .

4. Bapak Drs. Mirza Yasben, M.Soc.Sc, selaku dosen penguji memberikan masukan saran dan kritik yang membangun dalam mencari kekurangan atas naskah skripsi sehingga menyempurnakan naskah skripsi.
5. Ibu Yorry Hardayani, S.IP., M.Si selaku dosen penguji yang memberikan masukan saran dan kritik yang membangun dalam mencari kekurangan atas naskah skripsi sehingga menyempurnakan naskah skripsi.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu yang telah memberikan izin peneliti, membantu mengarahkan serta memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Keluarga Besarku Terutama Mamak & Bapak Ku, Adek-Adek ku (Sisi & Lia), kakak-kakak Sepupu ku (Jujun, Hadi, Rian Arif & Rudi), adik Sepupu, Adik sepupu (Jay, Yus, Hafis, Della, Indah) terimakasih atas do'a, bantuan, motivasi dan semangat yang telah kalian diberikan.
8. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Ekstensi Universitas Bengkulu angkatan 2011 (Siti, Weni, Lili, Elta, Titi, Firman, Ade Jaya, Abg Ruslan, Sutardi, Aa' Supri, Usef, Deden, Ade A, Beni, Efredi, Husni, Aidi, Abg Rosy, Abg Burman, Abg Dodi, Abg Said dan rekan-rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu).
9. Senior dan Rekan-rekan mahasiswa Administrasi Negara Ekstensi angkatan 2009, 2010 & 2012, serta kawan-kawan KKN Desa Pekik Nyaring 1.

Penulis, menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangannya, oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan rekan-rekan sekalian.

Wassalamualaikum Wr. Wb...

Bengkulu, 5 Januari 2017

Penulis

## **ABSTRAK**

### **Analisis Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu**

Oleh :

**GUNAWAN PRATAMA  
D1D111038**

Bencana banjir yang sering terjadi di Kota Bengkulu dan keluhan dari masyarakat Kota Bengkulu menjadi tanda tanya besar tentang akar permasalahan bencana tersebut sehingga peneliti meneliti permasalahan tentang peran serta yang dilakukan oleh instansi BPBD Kota Bengkulu dalam menangani masalah banjir itu sendiri. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap banjir di Kota Bengkulu dan juga untuk mengetahui akar permasalahan dan dicari solusinya. Metode yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif Dengan Teknik Purposive Sampling dengan aspek penelitian : 1. Pencegahan Bencana Banjir, 2. Penanganan Darurat Bencana Banjir, 3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana banjir. Hasil Penelitian bahwa adanya pemantauan terhadap kawasan bencana banjir, pembuatan peta rawan bencana, pelatihan kesiapan personil satgas BPBD Kota Bengkulu, sosialisasi yang rutin, pembentukan posko bencana banjir, penanganan darurat bencana banjir melalui satgas BPBD Kota Bengkulu, sarana dan prasarana serta peralatan yang digunakan dalam penanganan bencana banjir, pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi dari BPBD kepada masyarakat di Kota Bengkulu, pelaksanaan rehabilitasi bangunan lama, pelaksanaan rekonstruksi pada bangunan baru. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah Penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kota Bengkulu belum berjalan dengan maksimal, masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut. Hal ini ditandai dengan Pencegahan Bencana Banjir, Penanganan Darurat Bencana Banjir, Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana banjir masih banyak ditemukan permasalahan.

Kata Kunci : Banjir, Penanggulangan, Peran BPBD Kota Bengkulu



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Definisi Bencana .....	12
2.2 Jenis-Jenis Bencana Alam.....	17
2.3 Dampak Bencana .....	22
2.4 Tujuan Penanggulangan Bencana .....	23
2.5 Tahapan penanggulangan Bencana .....	24
2.6 Prinsip-Prinsip Penanggulangan Bencana.....	25
2.7 Tugas dan Fungsi BPBD Kota Bengkulu Berdasarkan Perda Kota Bengkulu No 03 Tahun 2010 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu .....	27
2.8 Indikator Penanggulangan Bencana Banjir .....	28
2.9 Kerangka Pikir .....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Fokus Penelitian.....	33
3.3 Aspek-Aspek Penelitian .....	33
3.4 Sasaran Penelitian .....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36

3.6 Teknik Analisis Data.....	38
-------------------------------	----

#### **BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

4.1 Gambaran Lokasi .....	41
4.2 Visi dan Misi.....	44
4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	46
4.4 Strategi dan Arah Kebijakan .....	48
4.5 Kondisi Pegawai .....	51
4.6 Susunan Organisasi .....	53
4.7 Struktur Organisasi .....	54
4.8 Pola Ruang Evakuasi .....	55

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Karakteristik Informan.....	56
5.2 Hasil Penelitian .....	58
5.2.1 Pencegahan Bencana Banjir.....	59
5.2.2 Penanganan Darurat Bencana Banjir .....	67
5.2.3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Banjir .....	75
5.3 Pembahasan.....	83

#### **BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan .....	88
6.2 Saran .....	89

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Peralatan Penanggulangan Bencana BPBD Kota Bengkulu	<b>8</b>
Tabel 4.5.1	Data Pegawai Menurut Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu K	<b>5</b> <b>1</b>
Tabel 4.5.2	Jumlah dan status pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu	<b>5</b> <b>2</b>
Tabel 4.5.3	Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu	<b>5</b> <b>2</b>
Tabel 5.1.1	Daftar Informan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu	<b>5</b> <b>6</b>
Tabel 5.1.2	Daftar Informan warga yang berada di wilayah rawan banjir dan terkena dampak banjir di Kota Bengkulu	<b>5</b> <b>7</b>
Tabel 5.2	Peralatan Penanggulangan Bencana BPBD Kota Bengkulu	<b>7</b> <b>4</b>
Tabel 5.3	Matrik Hasil Penelitian Penanggulangan bencana banjir oleh Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kota Bengkulu	<b>8</b> <b>5</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Design Kerangka Pikir</b>	<b>30</b>
<b>2.1</b>		
<b>Gambar</b>	<b>Struktur Organisasi</b>	<b>54</b>
<b>4.7</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1</b>	<b>Pedoman Wawancara</b>
<b>Lampiran 2</b>	<b>Renja Usulan 2016</b>
<b>Lampiran 3</b>	<b>Lakip</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 *Latar Belakang*

*Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara geografis terletak di daerah khatulistiwa, di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Pasifik dan Hindia, berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam.* Sebagai daerah rawan bencana, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi terjadinya bencana sebelum atau setelah terjadinya bencana yakni mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi. Sadar akan posisi sebagai negara bencana, maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana, BNPB pun dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana. Pembentukan BNPB merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Sekarang Indonesia telah berada dalam daftar Negara yang paling berpotensi bencana. Pada buku Kodoatie dan Sjarief (2009:8), data yang diperhitungkan oleh *United nations international strategy for Disaster Reduction (UNISDR)* yang diteliti mulai dari tahun 1977 sampai 2009 menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat sembilan dunia yang beresiko bencana. Hal ini didapat dari resiko bencana yang dialami oleh suatu negara serta dengan

pertimbangan kemampuan negara dalam menanggulangi bencana tersebut tetapi masyarakat dapat melihat sendiri begitu banyaknya bencana yang telah terjadi dalam Negara Indonesia yang beresiko sangat tinggi seperti kerusakan bangunan infrastruktur, kematian serta perekonomian melemah akibat bencana yang timbul.

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia harus bisa mewaspadaai segala bentuk bencana yang terjadi. Kebanyakan dari masyarakat belum menyadari bahwa bencana yang telah terjadi selama ini akibat dari ulah masyarakat itu sendiri dengan cara merusak lingkungan. Diperlukannya penanggulangan untuk mencegah datangnya bencana. Masyarakat harus membantu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana tersebut agar dapat terhindari dari berbagai macam bencana yang mengakibatkan laju pembangunan terhambat.

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (*emergency response*). Kurang adanya kebijakan pemerintah yang integral dan kurangnya koordinasi antar elemen dianggap sebagai beberapa penyebab yang memungkinkan hal itu dapat terjadi (sumber :[www.Antaraneews.com](http://www.Antaraneews.com), 23 Januari 2015).

Permasalahan mengenai penanggulangan bencana sering terjadi di Indonesia hingga saat ini. Seperti yang dilansir dari <http://news.okezone.com/> (21 Januari 2015) disebutkan bahwa lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah



disebabkan BNPB sebagai lembaga penggerak dari pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam berkoordinasi dengan daerah. Mengingat, BNPB tidak memiliki jalur komando langsung kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam persoalan penanganan bencana alam, misalnya, antar kepala daerah seakan-akan berjalan sendiri-sendiri. Padahal, bencana alam kerap terjadi di lokasi yang merupakan perbatasan dari banyak wilayah administratif. Seperti pada peristiwa naiknya status aktif Gunung Slamet hingga siaga III pada akhir Desember lalu. Persiapan menghadapi bencana mestinya melibatkan lima kabupaten yang menjadi lokasi Gunung Slamet, meliputi Kabupaten Brebes, Banyumas, Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang.

Pasal 18 di dalam Undang–Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kotamadya. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Kota Bengkulu mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu. Adapun dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bengkulu tersebut menyebutkan bahwa dengan peraturan daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat di bidang penanggulangan bencana daerah.

Kota Bengkulu merupakan salah satu wilayah yang rawan bencana karena lokasi dan kondisi geografisnya termasuk dalam daerah yang rawan bencana, terutama bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa vulkanik, gempa

tektonik dan bencana kebakaran. Kota ini terletak di pesisir barat pulau sumatra yang berhadapan langsung dengan samudra Indonesia dan secara geografis berada diantara 3045-3059 Lintang Selatan dan 102°14'-102°22' Bujur Timur dengan luas wilayah 539,3 km<sup>2</sup> terdiri dari luas laut 387,6 km<sup>2</sup> dan daratan 151,7 km<sup>2</sup>. Posisi Kota Bengkulu menyebabkan daerah ini mempunyai lingkungan pantai yang berhadapan dengan gelombang kuat dan dapat menimbulkan erosi alami pantai atau abrasi pantai (sumber:[www.bpskotabengkulu.com](http://www.bpskotabengkulu.com)). Oleh karena itu, diperlukan adanya kewaspadaan dan kesiapan dari segenap unsur terkait yang mempunyai fungsi dibidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat.

Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekontruksi dan rehabilitasi dari pascabencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja Negara yang memadai dan siap pakai dalam rekontruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.

Permasalahan mengenai bencana banjir sering juga terjadi di wilayah kota Bengkulu. Seperti yang telah diberitakan melalui ([www.metrotvnews.co.id](http://www.metrotvnews.co.id)) bahwa pada tahun 2014 silam telah terjadi bencana banjir yang merendam 200 rumah warga Kota Bengkulu. Air merendam rumah warga sudah setinggi satu meter akibat hujan deras masih terjadi dan untuk minum warga harus menggunakan air kemasan karena sumur ikut terendam. Hal semacam ini terjadi karena sungai

Bengkulu meluap dengan deras karena pintu air tidak berfungsi sehingga tidak dapat membendung masuknya air sungai akibat hujan deras. Ketika berbicara mengenai berita yang disampaikan oleh media tersebut maka dapat dianalisis bahwa dalam penanganan yang dilakukan oleh tim BPBD kota Bengkulu belum sepenuhnya optimal terbukti dengan adanya permasalahan pintu air yang tidak berfungsi sehingga air sungai meluap mengakibatkan ratusan rumah warga Kota Bengkulu terendam sehingga dapat dikatakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh BPBD Kota Bengkulu belum berjalan.

Berdasarkan berita yang di muat pada ([www.Antaraneews.com](http://www.Antaraneews.com), 23 Januari 2015) bahwa telah terjadi bencana banjir yang mengakibatkan hubungan transportasi Padang, Sumatera Barat (Sumbar)-Bengkulu putus total. Kedalaman air di lantai rumah warga sekitar satu meter atau melewati pinggang orang dewasa. Sebanyak 60 kepala keluarga yang rumahnya terendam banjir mengungsi ke Bukit PDAM yang berada di sekitar lokasi. Sebagai upaya untuk mengantisipasi jatuhnya korban akibat bencana tersebut maka Pemkab setempat telah mengerahkan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan peralatan penanggulangan bencana ke sejumlah titik terparah banjir. Dari pemaparan di atas bahwa bencana banjir dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pembangunan seperti contohnya ketika bencana banjir terjadi maka semakin banyak kerusakan di daerah yang terkena banjir baik itu perumahan maupun sawah dan lain lain, berita di atas terlihat bahwa penanggulangan yang diberikan oleh BPBD hanya bersifat pertolongan pertama tanpa ada tindak lanjutnya sehingga laju pembangunan dapat mengalami keterlambatan untuk naik.

Pada wawancara Pra Penelitian yang dilakukan oleh informan yang berinisial “AM” selaku pegawai BPBD Kota Bengkulu bahwa,

“Walaupun bencana tidak dapat diprediksi secara pasti, dalam fungsi BPBD Kota Bengkulu upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkuat struktur ataupun membangun struktur bangunan tahan gempa seperti shelter, dan lain-lain. Selain itu upayalain juga dapat dilakukan dalam bentuk non struktur, diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah dalam bentuk peta daerah rawan bencana, relokasi daerah rawan bencana, tata ruang/tata guna lahan dan informasi publik atau penyuluhan sadar bencana (wawancara pra penelitian BPBD Kota Bengkulu, Juli 2015).”

Adapun seperti yang telah diketahui berdasarkan pengamatan bahwa daerah-daerah rawan bencana di Kota Bengkulu meliputi daerah Suka Merindu, Tanjung Agung, Tanjung Jaya, Surabaya, Rawa Makmur, Lempuing, Sawah Lebar, Cempaka Permai dan Pagar Dewa sehingga diperlukannya penanggulangan Bencana yang maksimal dilakukan oleh BPBD Kota Bengkulu agar permasalahan banjir di daerah tersebut dapat terselesaikan dengan baik.

Seluruh usaha pemerintah Kota Bengkulu dan BPBD tersebut menjadi suatu proses yang berkesinambungan karena penanganan bencana tiap-tiap daerah membutuhkan siklus manajemen yang tidak boleh terhambat kondisi birokrasi. Pada prosesnya untuk menghindari kejenuhan masyarakat pada masa tidak ada bencana maka perlu didukung oleh kebijakan serta komitmen dari eksekutif pemerintah secara nyata, untuk perwujudan semua kebijakan yang telah terencana sehingga selalu ada aktifitas dimasa tidak ada bencana. Seperti pada Tugas Dan Fungsi BPBD Kota Bengkulu Berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2010 Tentang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu pada Ayat 1 menyebutkan bahwa usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi

Pada pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti tanggal 26 Februari 2015 setelah terjadinya bencana banjir tanggal 15 Februari 2015 tersebut, terlihat bahwa BPBD Kota Bengkulu belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal. Hal ini peneliti melihat belum ada tindak lanjut dari BPBD dalam penanggulangan bencana. contohnya bencana banjir yang sering terjadi di wilayah Rawamakmur yang belum ada tindak lanjutnya. Hal ini membuktikan bahwa peran BPBD belum maksimal. Masih terlihat genangan air yang menutupi ruas jalan sepanjang rawamakmur dan juga belum terlihat selokan-selokan kecil yang dapat mengurangi volume air di ruas jalan Kelurahan Rawamakmur dan juga permasalahan banjir yang terjadi di Tanjung Jaya berupa genangan air yang disebabkan pintu air yang tidak berfungsi maksimal ketika terjadi hujan deras. Selain itu, dirasakan sekarang kurang adanya bentuk kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh BPBD sehingga penanggulangan bencana tidak berjalan dengan baik.

Seperti yang disampaikan oleh warga di Kelurahan Rawamakmur yang berinisial "MS" bahwa,

“Bencana banjir yang sering terjadi disini merupakan yang kesekian kalinya mas. Yang saya lihat disini tidak adanya tindak lanjut untuk menanggulangi bencana banjir disini seperti misalnya bisa mas lihat sendiri disini tidak ada selokan untuk menampung air hujan yang turun hingga mengakibatkan banjir berada di bibir jalan dan mengganggu kendaraan yang lalu-lalang disekitar sini. Seperti bulan Februari 2015 kemaren telah terjadi banjir tetapi belum ada penanganan serius dari pihak pemerintah (Wawancara pra penelitian juli 2015).

Dari hasil wawancara pra penelitian bulan juli 2015 kepada warga di atas dapat di telaah bahwa peran BPBD Kota Bengkulu dalam mengatasi dan mencegah banjir di Kota Bengkulu belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari penanggulangan bencana yang dilaksanakan tidak ada tindak lanjutnya sehingga bencana banjir terus terjadi di daerah-daerah tertentu.

Terkait dengan hal penanggulangan bencana di Kota Bengkulu diperlukannya peralatan penanggulangan bencana yang memadai sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan maksimal. Adapun peralatan penanggulangan bencana yang di miliki oleh BPBD Kota Bengkulu sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Peralatan Penanggulangan Bencana BPBD Kota Bengkulu

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	Mobil Ranger	1 Unit	Baik
2	Mobil Ambulance	-	-
3	Motor Trail	2 Unit	Baik
4	Matras	2buah	Baik
5	Pelampung	15 buah	Baik
6	Velbet	5 buah	2 baik, 3 rusak
7	Perahu karet	3 unit	Baik
8	Water treatment	1 set	Baik
9	Genset	2 unit	Baik
10	Tenda keluarga	2 unit	1 baik, 1 rusak
11	Tenda pleton	1 unit	Baik
12	Tenda regu	3 unit	Baik

13	Mesin Pompa air	1 unit	Baik
14	Pelampung pompa air	2 unit	Baik
15	HT	1 unit	Baik
16	RIG	1 set	Baik

Sumber : BPBD Kota Bengkulu

Berdasarkan tabel tersebut, penulis dapat mengetahui bahwa dengan minimnya jumlah peralatan yang dimiliki BPBD Kota Bengkulu maka tidak dapat memberikan pertolongan dengan cepat terhadap masyarakat yang terkena banjir di Kota Bengkulu. Peralatan yang dipunyai belum begitu lengkap dan banyak. Seperti contohnya dengan jumlah penduduk di Kota Bengkulu yang banyak Khususnya di Kelurahan yang sering terkena banjir yaitu di Kelurahan Rawamakmur yang terdiri dari 40 KK yang berada di dekat kawasan bencana banjir seharusnya pelampung yang diperlukan sebanyak 40 buah malah hanya dipunyai 15 buah pelampung maka pelampung yang dimiliki tidak cukup cepat untuk mengevakuasi korban banjir. Selain itu, peralatan yang dimiliki oleh BPBD masih ada yang rusak sehingga tidak dapat digunakan sehingga memperlambat kerja tim penanggulangan bencana banjir, seperti contohnya BPBD hanya memiliki 2 unit tenda keluarga dalam kondisi 1 baik dan 1 rusak. Seharusnya BPBD Kota Bengkulu mempunyai minimal 4 tenda keluarga untuk menampung korban bencana banjir di wilayah Kota Bengkulu.

Seperti yang diungkapkan oleh informan yang berinisial “WH” pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu bahwa,

“sebenarnya *dek*, bencana-bencana yang telah terjadi di Kota Bengkulu ini bukan semata-mata kesalahan dari masyarakat. Akan tetapi, saya mengakui

kami belum dapat bekerja dengan maksimal dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana tersebut. Seperti ini ya. Misal terjadi bencana alam katakanlah banjir. Ketika banjir terjadi kami hanya bisa membantu seadanya memberikan pertolongan untuk menghindari korban tetapi untuk mencegah agar tidak terjadi banjir lagi di daerah rawan banjir belum bisa kami realisasikan dengan baik. Mungkin disini diperlukan manajemen dan rencana untuk melakukan mitigasi agar bencana di daerah rawan tersebut tidak terjadi lagi” (Wawancara, April 2015)

Pada wawancara yang dilakukan peneliti pada bulan April 2015 tersebut melihat peristiwa banjir bulan februari 2015 yang telah membanjiri rumah warga di Kelurahan Rawamakmur bahwa kinerja pegawai dalam melakukan pencegahan (mitigasi) dan penanggulangan bencana belum optimal. Bentuk penanggulangan bencana yang dilakukan hanya sekedar pertolongan biasa. Selain itu, terlihat dengan kurangnya manajemen yang dilakukan oleh BPBD sehingga tidak terjadinya koordinasi antara BPBD dengan dinas terkait penanggulangan bencana belum terlaksana. Jika, penanggulangan bencana terealisasi dengan baik maka adanya bentuk kerjasama antara BPBD dengan instansi lain untuk melakukan penanggulangan tersebut.

Oleh karena itu penulis menganggap bahwa penelitian yang berjudul “Analisis Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Bengkulu” sangat penting untuk diteliti.

## **1.2 Rumusan Masalah**



Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah “Bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap banjir di Kota Bengkulu?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap banjir di Kota Bengkulu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya di Kota Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana banjir.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi pembaca dan peneliti lain yang mempunyai minat yang sama yaitu untuk mengkaji masalah – masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari sebuah lembaga / organisasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1 Definisi Bencana**

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan/atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana, fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pada hakekatnya bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun karena ulah manusia yang mengakibatkan pengungsian adalah merupakan bencana bagi bangsa Indonesia. Selama ini penanggulangannya telah diupayakan melalui berbagai caradengan melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui koordinasi penanganan sejak di tingkat lokasi bencana di daerah sampai dengan di tingkat nasional.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis

Pada buku Nani Nurrachman (2007:3), Bencana merupakan kejadian yang luar biasa, diluar kemampuan normal seseorang menghadapinya, menakutkan dan juga mengancam keselamatan jiwa. Akibat dari bencana ini ialah berbagai

bangunan penting hancur, korban jiwa berjatuh serta berpengaruh pada kondisi psikologis dari mereka yang terkena bencana. Bencana sering menimbulkan kepanikan masyarakat dan menyebabkan penderitaan dan kesedihan yang berkepanjangan, seperti: luka, kematian, tekanan ekonomi akibat hilangnya usaha atau pekerjaan dan kekayaan harta benda, kehilangan anggota keluarga serta kerusakan infrastruktur dan lingkungan.

Bencana adalah keadaan yang mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh gejala alam atau perbuatan manusia (Deni Hidayati, 2005-65). Selain itu menurut Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief (2009:10), bencana merupakan gangguan atau kekacauan pada pola norma kehidupan. Gangguan atau kekacauan biasanya terjadi dengan cara tiba-tiba dan tak disangka.

Sedangkan Heru Sri Haryanto (2001 : 35) Mengemukakan bahwa: Bencana adalah Terjadinya kerusakan pada pola kehidupan normal, bersipat merugikan kehidupan manusia, struktur sosial serta munculnya kebutuhan masyarakat. Bencana dapat terjadi melalui suatu proses yang panjang atau situasi tertentu dalam waktu yang sangat cepat tanpa adanya tanda-tanda. Bencana sering menimbulkan kepanikan masyarakat dan menyebabkan penderitaan dan kesedihan yang berkepanjangan, seperti: luka, kematian, tekanan ekonomi akibat hilangnya usaha atau pekerjaan dan kekayaan harta benda, kehilangan anggota keluarga serta kerusakan infrastruktur dan lingkungan.

“Bencana alam” terdiri dua kata pembentuk frasa, yaitu “bencana” dan “alam”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “bencana” adalah *sesuatu*

*yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan (KBBI, 2001:31)*

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bencana adalah bencana yang disebabkan karena kondisi alam yang tidak seimbang (angin, tanah, air maupun api) sehingga menyebabkan kerusakan, gangguan ekonomi, penurunan kesehatan, penderitaan bahkan sampai dengan kematian, bencana tersebut sifatnya mendadak, sangat cepat dan menimbulkan kepanikan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dikenal pengertian dan beberapa istilah terkait dengan bencana.

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

## **2.2 Jenis-Jenis Bencana Alam**

Bencana alam seringkali terjadi secara tiba-tiba dan merenggut korban dalam jumlah besar. Untuk mengetahui cara penanganan bencana alam, terlebih dahulu kita harus mengetahui jenis-jenis bencana alam yang dapat terjadi. Dari buku panduan Bakornas PB,(2006:3-4) menyebutkan bahwa jenis-jenis bencana alam diantaranya adalah:

## 1. Gempa bumi

Gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba, penyebabnya antara lain:

- a. Proses tektonik akibat pergeseran kulit/lempeng bumi;
- b. Aktivitas sesar dipermukaan bumi;
- c. Pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuhnya tanah;
- d. Aktivitas gunung api;
- e. Ledakan nuklir.

## 2. Letusan gunung api.

Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar.

## 3. Tsunami.

Tsunami adalah rangkaian gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Tsunami dapat disebabkan oleh gempa bumi diikuti dengan dislokasi/perpindahan masa tanah/batuan yang sangat besar di bawah air laut/danau, tanah longsor di dalam laut, letusan gunung api di bawah laut atau gunung api pulau. Kecepatan tsunami sekitar 25-100 km/jam di dekat pantai, bahkan hingga lebih 800 km/jam di laut dalam, ketinggian air tsunami bisa mencapai 5-40 meter.

## 4. Tanah longsor.

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran bergerak ke bawah atau ke luar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.



## 5. Banjir

Banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal, sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan padalahan rendah di sisi sungai. Curahan hujan dengan intensitas tinggi merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir.

## 6. Kekeringan. Kekeringan adalah hubungan antara kesediaan air yang jauh di bawah kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.

## 7. Angin topan atau Badai.

Angin topan atau badai merupakan pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa.

Selain itu, Menurut Kodoatie dan Sjarief (2009:65) Bencana yang menumbulkan dan kerugian umat manusia, dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

- a. Geologi ( gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gerakan tanah)
- b. Hidro Meteorologi ( banjir, topan, banjir bandang dan kekeringan)
- c. Biologi (epidemi, penyakit tanaman, hewan)
- d. Teknologi ( kecelakaan transportasi, industri)
- e. Lingkungan (kebakaran, kebakaran hutan, penggundulan hutan)
- f. Sosial (konflik dan terorisme)

### **2.2.1 Definisi Banjir**

Banjir dalam pengertian umum adalah debit aliran air sungai dalam jumlah yang tinggi, atau debit aliran air di sungai secara relatif lebih besar dari kondisi normal akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu terjadi secara terus menerus, sehingga air tersebut tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya (Peraturan Dirjen RLPS No.04 thn 2009)

Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu, terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (runoff) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain (Ligal, 2008: 45).

Banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air disuatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi (Rahayu dkk, 2009). Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling sering

terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi (IDEP, 2007 :36).

Menurut Dede Rohmat (2009:67) baha banjir merupakan kejadian hidrologis yang dicirikan dengan debit dan/atau muka air yang tinggi dan dapat menyebabkan penggenangan pada lahan di sekitar sungai, danau atau sistem air lainnya.

### **1.2.2 Penyebab Banjir**

Penyebab banjir antara lain :

1. Hujan, dimana dalam jangka waktu yang panjang atau besarnya hujan selama sehari-hari.
2. Erosi tanah, dimana menyisakan batuan yang menyebabkan air hujan mengalir deras diatas permukaan tanah tanpa terjadi resapan.
3. Buruknya penanganan sampah yaitu menyumbatnya saluran-saluran air sehingga tubuh air meluap dan membanjiri daerah sekitarnya.
4. Pembangunan tempat pemukiman dimana tanah kosong diubah menjadi jalan atau tempat parkir yang menyebabkan hilangnya daya serap air hujan. Pembangunan tempat pemukiman bisa menyebabkan meningkatnya risiko banjir sampai 6 kali lipat dibandingkan tanah terbuka yang biasanya mempunyai daya serap tinggi.
5. Bendungan dan saluran air yang rusak dimana menyebabkan banjir terutama pada saat hujan deras yang panjang.

6. Keadaan tanah dan tanaman dimana tanah yang ditumbuhi banyak tanaman mempunyai daya serap air yang besar.
7. Didaerah bebatuan dimana daya serap air sangat kurang sehingga bisa menyebabkan banjir kiriman atau banjir bandang (IDEP, 2007)

### **1.2.3 Dampak Banjir**

Banjir akan terjadi gangguan-gangguan pada beberapa aspek berikut :

1. Aspek penduduk, antara lain berupa korban jiwa/meninggal, hanyut, tenggelam, luka-luka, korban hilang, pengungsian, berjangkitnya penyakit seperti penyakit kulit, demam berdarah, malaria, influenza, gangguan pencernaan dan penduduk terisolasi.
2. Aspek pemerintahan, antara lain berupa kerusakan atau hilangnya dokumen, arsip, peralatan, perlengkapan kantor dan terganggunya jalannya pemerintahan.
3. Aspek ekonomi, antara lain berupa hilangnya mata pencaharian, tidak berfungsinya pasar tradisional, kerusakan atau hilangnya harta benda, ternak dan terganggunya perekonomian masyarakat.
4. Aspek sarana/prasarana, antara lain berupa kerusakan rumah penduduk, jembatan, jalan, bangunan gedung perkantoran, fasilitas sosial dan fasilitas umum, instalasi listrik, air minum dan jaringan komunikasi.

5. Aspek lingkungan, antara lain berupa kerusakan ekosistem, objek wisata, persawahan/lahan pertanian, sumber air bersih dan kerusakan tanggul/jaringan irigasi (Mistra, 2007; Rahayu dkk, 2009).

### **2.3 Dampak Bencana**

Menurut Saru Arifin (2008:5), para korban selamat saat terjadi bencana mengalami persoalan dalam penyesuaian diri terhadap kondisi fisik, psikologis dan sosial yang ada setelah terjadinya bencana. Pada kondisi seperti ini sering terjadi konflik batin yang dirasakan oleh korban bencana tersebut karena kondisi yang tidak menerima keadaan yang telah terjadi. Selain itu seperti yang disampaikan oleh Nurachman (2007 :4), bencana merupakan suatu pengalaman traumatik, karena dalam waktu sekejap perubahan di lingkungan dan diri sendiri terjadi secara sangat bermakna.

Pada dasarnya menurut Kristi Poerwandari (2005:38) bahwa reaksi terhadap trauma tidak dapat disamaratakan antara seseorang dengan lainnya. Demikian pula dengan faktor yang melatarbelakangi perbedaan seseorang dalam reaksi trauma. Sifat pengalaman trauma merupakan ciri kualitas diri seseorang setelah mengalami bencana dan tidak adanya dukungan sosial dari orang lain. Selain itu, menurut Edi Suharto (2005:5) bencana merupakan salah satu faktor besar yang menghambat laju pembangunan nasional. Dalam pembangunan terdapat fungsi-fungsi pembangunan dimana fungsi tersebut mempunyai tugas yang harus dilaksanakan yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, perawatan masyarakat dan pembangunan manusia.

## **2.4 Tujuan Penanggulangan Bencana**

Pada pasal 4 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Tujuan Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa tujuan dari penanggulangan bencana ialah sebagai berikut :

- a) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- b) menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d) menghargai budaya lokal;
- e) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **2.5 Tahapan Penanggulangan Bencana**

Menurut Wardo (2010:12) Penanganan bencana harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi dan juga setelah terjadinya bencana. Berikut tahapan penanggulangan bencana, yang meliputi kegiatan pra bencana (pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi), tanggap darurat dan pasca bencana/ pemulihan (rehabilitas, rekonstruksi):

### **a. Pra Bencana**

Bencana hampir seluruhnya datang mendadak, oleh karena itu perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apabila terjadi musibah.

Apalagi pada daerah yang tidak terduga akan terjadi bencana, karena tidak termasuk daerah rawan bencana sebab sudah puluhan atau ratusan tahun tidak pernah ada bencana di daerah tersebut. Tahap ini dapat dilakukan dari pencegahan, kesiapan dan mitigasi.

b. Tanggap Darurat (*response*)

Penanganan saat terjadi bencana adalah semua kegiatan yang dilakukan ketika bencana melanda, yang tujuannya adalah menyelamatkan korban manusia (jiwa-raga) dan harta benda. Meliputi kegiatan evakuasi korban ke tempat penampungan sementara, penyelenggaraan dapur umum, distribusi atau penyaluran bantuan dalam bentuk pangan, sandang, obat-obatan, bahan bangunan, peralatan ekonomis-produktif (seperti alat pertanian dan pertukangan) serta uang sebagai modal awal hidup pasca bencana, pendataan korban dan jumlah kerugian material (harta benda).

c. Pasca Bencana (Pemulihan/ *recovery*)

Bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan setelah terjadinya bencana, untuk secara berurut menyelamatkan nyawa manusia dan memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, memulihkan kegiatan normal dan memulihkan infrastruktur fisik serta pelayanan masyarakat, pembangunan hunian sementara, penyebaran informasi publik, pendidikan kesehatan dan keselamatan, rekonstruksi, program konseling dan studi mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan.

## **2.6 Prinsip – prinsip dalam Penanggulangan Bencana**

Adapun dalam Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana ialah sebagai berikut :

- a.** Cepat dan Akurat – Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
- b.** Prioritas – Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
- c.** Koordinasi – Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.
- d.** Keterpaduan – Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sector secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
- e.** Berdaya Guna – Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
- f.** Berhasil Guna – Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.



- g.** Transparansi - Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- h.** Akuntabilitas – Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
- i.** Kemitraan
- j.** Pemberdayaan.
- k.** Nondiskriminasi – Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun
- l.** .Nonproletisi – Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

## **2.7 Tugas dan Fungsi BPBD Kota Bengkulu berdasarkan PERDA Nomor 03 tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu**

### **1. Tugas BPBD Kota Bengkulu**

Tugas BPBD mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah kota dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Bengkulu;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Fungsi BPBD Kota Bengkulu**

BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## **2.8 Indikator Penanggulangan Bencana Banjir**

Pasal 1 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan indikator-indikator Penanggulangan Bencana. Adapun indikator penanggulangan bencana tersebut ialah sebagai berikut:

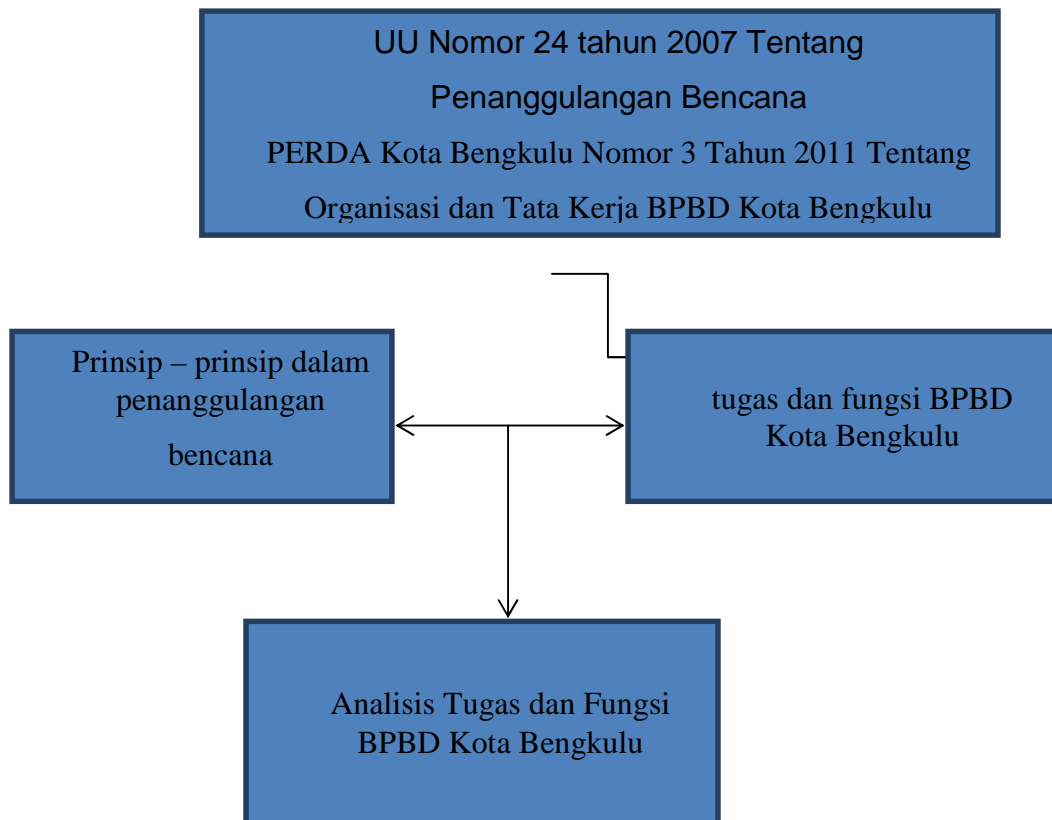
1. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
2. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
3. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
4. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayahpascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan

ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

## 2.9 Kerangka Pikir

**Gambar 2.1**

**Design Kerangka Pikir**



Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia diperlukan penanggulangan bencana agar dapat meminimalisir kerusakan atau bencana yang ada di Indonesia hingga pembangunan di Indonesia dapat terwujud. Indonesia menganut sistem desentralisasi sehingga undang-undang ini diturunkan hingga

menjadi Peraturan daerah. Salah satu daerah yang melaksanakan penanggulangan bencana yaitu Kota Bengkulu sehingga undang-undang tersebut diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata kerja BPBD Kota Bengkulu. Pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Bengkulu. Pada PERDA ini menjelaskan bahwa penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui pencegahan dan mitigasi atau penyelesaian masalah. Pelaksanaan penanggulangan bencana tersebut dijalankan oleh SKPD di Kota Bengkulu yang menaungi masalah penanggulangan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu. Dari hal tersebut maka tertuang dalam TUPOKSI BPBD Kota Bengkulu dan dijalankan melalui prinsip-prinsip penanggulangan bencana seperti pencegahan dan mitigasi. Dalam penelitian ini bahwa bencana yang diteliti ialah bencana banjir maka dari itu dalam penelitian ini bahwa penanggulangan bencana yang dilakukan merupakan penanggulangan bencana terhadap bencana banjir yang sering terjadi di Kota Bengkulu. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Kota Bengkulu diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Bengkulu dan prinsip-prinsip dalam menangani atau menanggulangi bencana banjir.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2010 :9) adalah metode yang digunakan untuk meneliti dapat kondisi obyek yang alamiah, untuk mendapatkan data yang mendalam dengan peneliti sebagai instrument kunci.

Menurut Malo dan Trisnoningias (1999 : 9), penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menguraikan serta menggambarkan situasi teraktual yang berupa gejala sosial tertentu sehingga diperoleh kesimpulan dari masalah yang terjadi. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini dimaksud untuk menjawab serta mendapatkan solusi dari pemecahan masalah mengenai gejala sosial dalam permasalahan penelitian.

Dari gambaran pengertian kualitatif serta metode deskriptif tersebut maka didapat ciri-ciri atau karakteristik penelitian kualitatif. Adapun ciri-ciri atau karakteristik penelitian kualitatif menurut Arikanto (2006 : 15) yaitu :

1. Mempunyai sifat induktif,
2. Melihat setting dan respon secara keseluruhan atau holistic,
3. Memahami responden dari titik tolak pandangan responden sendiri,
4. Menekankan validitas penelitian ditekankan pada kemampuan peneliti,
5. Menekankan pada setting alami, dan
6. Mengutamakan proses dari pada hasil

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa dokumen-dokumen, catatan, serta catatan penelitian dilapangan sehingga penelitian ini bukan digunakan untuk mengukur serta membandingkan antara variabel dengan variabel lainnya. Adapun sesuai dengan yang dituliskan di atas maka penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu Analisis Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Bengkulu.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Adapun secara fokus penelitian bahwa batasan penelitian yang diteliti oleh peneliti melingkupi pelaksanaan atau implementasi atas tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu terhadap bencana banjir. Hal ini mencakup usaha implementasi pencegahan, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi bencana banjir yang dilakukan sehingga fokus penelitian yang diteliti berupa Analisis Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Bengkulu.

Penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Bengkulu dapat diartikan sebagai pelaksanaan pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekontruksi yang dilakukan oleh BPBD Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pencegahan dan penanganan bencana banjir di Kota Bengkulu.

### **3.3 Aspek-Aspek Penelitian**

Aspek penelitian yaitu petunjuk atau indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Dengan menggunakan aspek-aspek penelitian, peneliti

akan dapat lebih mudah untuk mengetahui permasalahan mengenai variable yang akan diteliti. Adapun aspek-aspek penelitian yang diteliti pada penelitian ini diambil dari tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Pasal 3 PERDA Nomor 03 tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu. Adapun aspek tersebut ialah sebagai berikut :

1. Pencegahan Bencana Banjir
2. Penanganan Darurat Bencana Banjir
3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana banjir

### **3.4 Sasaran Penelitian**

Subyek penelitian merupakan informan yang diteliti. Menentukan informan merupakan hal yang sangat penting untuk membantu peneliti dalam proses penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik *purposive sampling*(sampel bertujuan). Menurut Sugiyono (2011 : 85) *purposive sampling* merupakan sampel yang sengaja dipilih karena waktu dan tujuan tertentu yang penulis anggap dapat mewakili dan memahami masalah yang diteliti. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk memperoleh keterangan serta data-data lebih lanjut sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan baik. Dengan adanya informan inti, maka penulis anggap dapat meminimalisir kesalahan dalam penelitian sehingga penulis menganggap subyek yang akan diteliti layak untuk menjadi informan.

Untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dilapangan, maka Spradly (dalam Faisal, 1990 : 44) menerangkan persyaratan yang dipenuhi oleh seorang informan yaitu :



1. Mereka yang menguasai dan memahami melalui proses enkulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati.
2. Mereka tergolong masih sedang berkecimpung/terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai kesempatan/waktu yang memadai untuk diminta informasi.

Dijelaskan kembali mengenai pemberi informasi yaitu informan. Untuk menentukan informan penelitian maka diperlukan kriteria sebagai berikut :

1. Orang yang dipandang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang objek yang akan diteliti.
2. Orang yang dipandang mampu memberikan informasi secara mendalam yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
3. Orang yang terlibat langsung dalam aktivitas lembaga yang akan dijadikan pusat penelitian.
4. Orang yang mengetahui atau terlibat langsung dalam komunitas masyarakat yang menjadi objek dari penelitian.

Maka informan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu
2. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu
3. Kabid Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu

4. Kabid Rehabilitas dan Rekontruksi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu
5. Kasubbid Pencegahan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu
6. Kasubbid Kesiapsiagaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu
7. Kasubbid Kedaruratan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu
8. Kasubbid Rehabilitasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu
9. Kasubbid Rekontruksi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu
10. Satu orang satgas yang bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu
11. Masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak bencana sebanyak sepuluh orang

Peneliti mengambil informan diatas karena informan-informan tersebut mengerti dan memahami tentang masalah yang diteliti dan mereka sebagai sumber inti untuk mendapat data yang validitas hingga penelitian ini terselesaikan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melaksanakan penelitian, diperlukannya teknik untuk mengumpulkan data-data dilapangan sehingga penelitian dapat berjalan. Adapun menurut Sugiyono (2011 : 224) bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis

dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam sebuah penelitian adalah mendapatkan data sehingga tanpa mengetahui teknik yang digunakan maka seorang peneliti tidak akan bisa mendapatkan data yang memenuhi standar.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data skunder. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dari :

1. Observasi

Menurut Kartono (1980: 142) observasi merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Tujuan observasi adalah untuk mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari inter relasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kulturil tertentu. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai implementasi tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Bengkulu. Hal-hal yang di amati seperti pelaksanaan penanggulangan bencana banjir oleh BPBD ketika sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan pasca terjadi bencana banjir. Selain itu peneliti mengamati sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas BPBD.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang mengetahui dan memahami tentang pokok permasalahan seperti yang disebutkan dalam sub bab sebelumnya mengenai subyek penelitian. Wawancara yang dilakukan dalam

penelitian ini berangkat dari judul yang diteliti yaitu implementasi tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Bengkulu.

Adapun untuk meneliti persoalan lebih lanjut mengenai masalah yang diteliti hingga penelitian dapat terselesaikan maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sekunder.

### 3. Dokumentasi

Pengertian dokumen menurut Gottschalk Louis (1986:38) adalah sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis dan petilasan-petilasan arkeologis. Dokumen digunakan untuk surat-surat resmi dan surat-surat Negara seperti surat perjanjian, undang-undang dan hibah. Adapun dalam penelitian ini, dokumentasi berisikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti notulensi kegiatan, laporan kerja dll.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Setelah mengumpulkan data-data yang diperoleh dari lapangan maka perlu untuk dianalisis hingga penelitian dapat diperoleh masalah, solusi serta tersajikan dengan baik. Menurut Moleong (2006 : 103), analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis agar data yang telah didapat terolah dengan baik. Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori dari Miles dan Huberman (2001:15)

yaitu dengan tahapan reduksi data, menampilkan data, serta verifikasi data.

Komponen terstruktur tersebut sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam melakukan reduksi data mencakup unsur-unsur yaitu :

1. Proses pemilihan data atas dasar tingkat relevansi dan kaitannya dengan setiap kelompok data.
2. Menyusun data kedalam satuan-satuan jenis, pengelompokan data dalam satuan-satuan sejenis ini juga dapat diekuivalenkan sebagai kegiatan kategorisasi/variabel.
3. Membuat koding data sesuai dengan kisi-kisi kerja penelitian.

Pada tahap ini peneliti memilih data-data yang telah didapatkan dari lapangan. Data dipilih sesuai dengan fokus penelitian baik dari data primer maupun data sekunder.

b. Menampilkan Data

Menampilkan data dilakukan dengan cara menyusun data serta menghubungkan data-data antar kategori/variable yang dibentuk melalui teks naratif dan dapat juga berbentuk grafik, matriks, chart dan jejaring kerja. Menampilkan data yang baik merupakan suatu kepuasan bagi peneliti hingga peneliti dapat melakukan tahapan selanjutnya. Karena itu menampilkan data merupakan suatu hal yang sangat penting karena untuk menuju ke analisis

yang validitas diperlukan penampilan data yang baik sehingga dapat lebih focus dalam menarik kesimpulan.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data sama saja dengan penarikan kesimpulan. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang ada pada rumusan masalah dan merupakan temuan baru yang sebelumnya tidak diketahui orang lain. Kesimpulan merupakan hasil temuan dari uraian-uraian penjelasan dan data yang telah di tampilkan. Kesimpulan yang dilakukan berlandaskan pada rumusan masalah yang diteliti.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti berusaha memperoleh data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian peneliti mencoba memfokuskan kategori/variabel yang ada dalam data penelitian hingga peneliti dapat menarik kesimpulan dengan baik. Dengan memahami proses tersebut, diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga hasil penelitian dapat valid.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI PENELITIAN**

#### **4.1. Gambaran Lokasi**

##### **4.1.1 Gambaran Lokasi Kota Bengkulu**

Kota Bengkulu sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara geografis merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana alam dan memiliki potensi bencana yang sangat tinggi dan bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi alam, keanekaragaman penduduk dan budaya serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat menyebabkan timbulnya risiko terjadinya bencana alam, bencana ulah manusia dan kedaruratan kompleks, meskipun disisi lain juga kaya akan sumberdaya alam. Pada umumnya risiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api), bencana akibat hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumberdaya yang terbatas, alasan ideologi, religius serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik.

Kota Bengkulu juga merupakan Ibukota Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah lebih dari 530 Km<sup>2</sup>, terdiri atas luas daratan 151.7 Km<sup>2</sup> dan

lautan 387.6 Km<sup>2</sup>. sebagai Ibukota Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu tentu saja merupakan pusat Pemerintahan, Transportasi, Komunikasi, Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata, Perekonomian dan jasa serta lainnya. Kota Bengkulu sendiri terdiri dari 9 Kecamatan dan 67 Kelurahan, serta memiliki jumlah penduduk lebih dari 300.000 jiwa atau berarti lebih kurang 20% dari jumlah keseluruhan penduduk Provinsi Bengkulu. Dengan letak wilayah di pantai barat Sumatera Kota Bengkulu secara geometrik merupakan tempat pertemuan antara lempeng India-Australia dan lempeng Eurasia serta dilewati oleh sesar Sumatera yang memanjang sepanjang pulau Sumatera, sehingga tidaklah berlebihan jika Bengkulu merupakan kawasan rawan bencana Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Longsor, dan lain sebagainya.

#### **4.1.2 Gambaran BPBD Kota Bengkulu**

##### **1. Sejarah BPBD Kota Bengkulu**

Pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi Penanggung Jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Selanjutnya dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terpadu, Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sesuai Pasal 18, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor : 19 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan



Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu yang kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor: 03 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu, maka secara efektif Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu melaksanakan tugas dan kegiatan pada tanggal 21 Pebruari 2009.

## **2. Lokasi dan Batas-batas Lokasi BPBD Kota Bengkulu**

Lokasi BPBD Kota Bengkulu terdapat di Jalan RE. Martadinata Kota Bengkulu. Adapun lokasi BPBD Kota Bengkulu berbatasan dengan :

- a. Sebelah timur berbatasan dengan perkebunan
- b. Sebelah barat berbatasan dengan pemukiman warga
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan perkebunan
- d. Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya

## **22. Visi dan Misi**

Atas dasar kondisi ideal yang diinginkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, dan Tugas Pokok serta Fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu maka Visi yang ditetapkan untuk tahun 2014-2018 adalah: "**Menjadi Institusi Terdepan Untuk Mewujudkan Bengkulu Kota Siaga Bencana, Masyarakat Yang Siap, Tanggap dan Tangguh Menghadapi Bencana**". Hal ini di tindaklanjuti berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor: 03 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu.

Dari visi tersebut, terdapat lima (5) pengertian yang perlu didefinisikan lebih lanjut yakni :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Siaga Bencana adalah suatu kondisi dimana tindakan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara menyeluruh, terkoordinasi cepat, tepat dan akurat serta efektif dan efisiensi.
3. Menjadi Institusi terdepan, yaitu institusi yang mampu menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan, tanggungjawab, dan tugas pokok serta fungsinya.
4. Masyarakat yang siap siaga, yaitu masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan serta mempunyai keberanian untuk bertindak cepat dan tepat dalam menghadapi bencana.
5. Masyarakat yang tanggap, yaitu masyarakat yang cepat merespon dan bertindak terhadap gejala yang timbul dari ancaman bencana.
6. Masyarakat yang tangguh, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan fisik dan psychis dalam menghadapi dan menanggulangi bencana.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Misi yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu adalah :

1. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana Yang Terencana, Terrpadu Dan Terkoordinasi.

2. Membangun Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Kapasitas Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu
3. Menyelenggarakan upaya Peringatan Dini dan Mitigasi (Pengurangan Resiko Bencana) Bencana
4. Melakukan Tindakan Yang Terkoordinasi Secara Menyeluruh, Cepat, Tepat, Efektif Dan Efisiensi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana.
5. Pemulihan Pasca Bencana Yang Terencana, Terrpadu Dan Terkoordinasi, Menyeluruh Dan Bermartabat

#### **4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu disusun dan ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun berdasarkan visi dan misi.

Pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi BPBD Kota Bengkulu perlu di arahkan agar mengenai sasaran yang di inginkan dan sesuai dengan tujuan di bentuknya BPBD Kota Bengkulu. Adapun tujuan dan sasaran menurut Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 03 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu ialah sebagai berikut :

##### **1. Tujuan**

Tujuan merupakan hasil dari permasalahan dan solusi yang hendak di capai. Adapun tujuan BPBD Kota Bengkulu ialah sebagai berikut :

- a. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana yang baik
- b. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan untuk penanggulangan bencana.
- c. Meningkatkan kesadaran, kesiapan, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana.
- d. Melindungi korban bencana dan menghindari kemungkinan bertambahnya korban bencana.
- e. Memulihkan dampak bencana menuju kehidupan masyarakat yang stabil, aman, terkendali, dan tangguh hidup di wilayah rawan bencana.

## **2. Sasaran**

Sasaran yang hendak dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Terbitnya regulasi penanggulangan bencana yang memadai.
- b. Tersedianya dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu, menyeluruh dn terkoordinasi
- c. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara penanggulangan bencana.
- d. Meningkatnya kapasitas sumber daya yang berkualitas dalam penanggulangan bencana.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memadai.

- f. Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien.
- g. Meningkatnya kesadaran, kesiapan, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan mengurangi risiko bencana.
- h. Meningkatnya upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penanganan pengungsi.
- i. Meningkatnya upaya perbaikan, pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan pasca bencana.

#### **4.4 Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada pelaksanaan tugas diperlukannya strategi yang dilakukan oleh BPBD Kota Bengkulu agar dapat memecahkan masalah sehingga dapat tercapainya tujuan yang di inginkan. Selain itu, diperlukan juga arah kebijakan untuk mengarahkan pelaksanaan tugas BPBD sehingga dapat di kontrol dengan baik. Maka dari itu dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor: 03 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu di tegaskan bahwa strategi dan arah kebijakan pelaksanaan tugas BPBD Kota Bengkulu ialah sebagai berikut :

##### **A. Strategi**

1. Mengembangkan regulasi penanggulangan bencana sesuai dengan kondisi wilayah.
2. Memadukan perencanaan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan.

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun terdapat potensi terjadinya bencana.
6. Menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana pada saat situasi terjadinya bencana.
7. Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana.

## **B. Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan terhadap strategi yang menjadi pedoman dalam menentukan program dan kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dinyatakan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Penguatan peraturan perundangan dan kapasitas kelembagaan, akan diupayakan melalui implementasi program:
  - a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - b. Penguatan kelembagaan BPBD.
  - c. Penguatan peraturan perundangan dan kapasitas kelembagaan.
  - d. Peningkatan disiplin aparatur.
  - e. Fasilitasi pindah/purna tugas

2. Perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu, didukung dengan pelaksanaan program:
  - a. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan.
  - b. Sinkronisasi program dan kegiatan penanggulangan bencana.
  - c. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penanggulangan bencana.
  - d. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
3. Pendidikan dan pelatihan kebencanaan, dengan program pembangunan:
  - a. Peningkatan kualitas SDM dan kesiapsiagaan
  - b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang diimplementasikan melalui program:
  - a. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana logistik
5. Pencegahan dan Mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, dengan implementasi program:
  - a. Pencegahan dan mitigasi bencana
  - b. Pencegahan dini dan penanggulangan bencana
  - c. Pengurangan risiko bencana
6. Peringatan dini terhadap ancaman bencana, dengan pelaksanaan program Peringatan dini
7. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi kejadian bencana, akan didukung melalui implementasi program Kesiapsiagaan

8. Peningkatan upaya tanggap darurat dan program pasca bencana, dengan program Kesiapsiagaan darurat dan evakuasi bencana.
9. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, akan diimplementasikan melalui program:
  - a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
  - b. Inventarisasi dan identifikasi kerusakan dan kerugian akibat bencana yang terjadi.

#### **4.5. Kondisi Pegawai**

Dalam penanganan bencana terkhususnya bencana banjir di perlukan SDM yang berkualitas agar penanggulangan bencana yang dilaksanakan dapat berjalan dengan optimal. SDM yang berkualitas akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai sehingga berpengaruh juga terhadap tujuan yang hendak di capai instansi itu khususnya dan Kota Bengkulu umumnya. Di bawah ini akan dijelaskan klasifikasi SDM yang ada di BPBD Kota Bengkulu berdasarkan tingkat pendidikan, eselon, kepangkatan dan golongan. Adapun menurut tingkat pendidikannya ialah sebagai berikut :



Tabel 4.5.1  
Data Pegawai Menurut Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin  
Data pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Bengkulu

NO	PANGKAT	GO L	JENIS KELAMIN		Juml ah
			Laki- laki	Perempu an	
1	2	3	4	5	6
1.	Juru Muda	Ia	-	-	-
2.	Juru Muda Tk I	Ib	1	-	1
3.	Juru	Ic	-	-	-
4.	Juru Tk I	Id	-	-	-
5.	Pengatur Muda	IIa	-	-	-
6.	Pengatur Muda Tk I	IIb	4	-	4
7.	Pengatur	IIc	1	1	2
8.	Pengatur Tk I	IId	-	-	-
9.	Penata Muda	IIIa	3	-	3
10.	Penata Muda Tk I	III b	-	-	-
11.	Penata	IIIc	6	2	8
12.	Penata Tk I	III d	4	-	4
13.	Pembina	Iva	3	1	4
14.	Pembina Tk I	IV b	1	-	1
15.	Pembina Utama Muda	IV c	-	-	-
16.	Pembina Utama Madya	IV d	-	-	-
17.	Pembina Utama	IV e	-	-	-
18	Honorer	-	1	1	2
<b>JUMLAH</b>			25	5	30

Sumber data :Badan Penanggulangan Bencana Kota Bengkulu

Dilihat melalui tingkat kepegangannya maka untuk keseluruhan pegawai berjumlah 30 orang. Dilihat dari komposisi kepegangatan bahwa Pembina TK.1 berjumlah 1 orang, Pembina berjumlah 4 orang, Penata Tingkat 1 berjumlah 4 orang, Penata berjumlah 8 orang, Penata Muda berjumlah 3 orang, Pengatur

berjumlah 2 orang, PengaturMuda Tingkat 1 berjumlah 4 orang, JuruMuda Tingkat 1 berjumlah 1 orang.

Tabel 4.5.2  
Jumlah dan status pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu

No	Uraian	GOLONGAN					Jumlah
		Honor er		I I	I I I	I V	
1	Pegawai Negeri Sipil	-		6	15	5	27
2	CPNSD	-		-	-	-	0
3	Honorer	3		-	-	-	3
<b>JUMLAH</b>							<b>30</b>

Sumber data :Badan Penanggulangan Bencana Kota Bengkulu

Dilihat melalui tingkat golongan maka untuk keseluruhan pegawai berjumlah 30 orang. Dilihat dari komposisi golongan bahwa, pegawai yang memiliki golongan I berjumlah 1 orang, pegawai yang memiliki golongan II berjumlah 6 orang, pegawai yang memiliki golongan III berjumlah 15 orang, pegawai yang memiliki golongan IV berjumlah 5 orang, Staf berjumlah 3 orang.

Tabel 4.5.3  
Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan  
Data pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota  
Bengkulu

No	Tingkat Pendidikan	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1	SD/SR	-	-	-
2	SLTP/ST	2	-	2
3	SLTA/MAN/S MK	5	1	6
4	D-1	-	-	-
5	D-2	-	-	-
6	D-3	1	1	2
7	D-4	-	-	-
8	S-1	13	4	17
9	S-2	3	-	3
10	S-3	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>24</b>	<b>6</b>	<b>30</b>

Sumber data :Badan Penanggulangan Bencana Kota Bengkulu

Dilihat melalui tingkat pendidikannya maka untuk keseluruhan pegawai berjumlah 30 orang. Dilihat dari komposisi pendidikan bahwa pendidikan S2 berjumlah 3 orang, pendidikan S1 berjumlah 17 orang deng, pendidikan D3 berjumlah 2 orang, pendidikan SMA/Sederajat berjumlah 6 orang,pendidikan SMP/Sederajat berjumlah 2 orang.

#### 4.6 Susunan Organisasi

1. Kepala Badan
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana

Susunan organisasi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kota Bengkulu terdiri atas :

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretaris Unsur Pelaksana Terdiri Dari :
  - a. Kepala Sub Bagian Umum
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
  - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terdiri Dari :
  - a. Kepala Sub Bidang Pencegahan
  - b. Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan
4. Bidang Kedarutan Dan Logistik Terdiri Dari :
  - a. Kepala Sub Bidang Kedaruratan
  - b. Kepala Sub Bidang Logistik
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - a. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi
  - b. Kepala Sub Bidang Rekonstruksi

#### **4.8 Pola Ruang Evakuasi**

penataan ruang berbasis mitigasi bencana maka ditetapkan pola ruang jalur evakuasi dan titik berkumpul sebagai berikut :

1. Jalan WR Supratman, Jl. Budi Utomo, Jl. Bandar Raya menuju Kampus Universitas Bengkulu.
2. Pasar Bengkulu - Jalan. Kalimantan - Jalan. Enggano menuju Kampung Kelawi
3. Jalan. Pendakian - Jalan. A. Yani, Jalan. Letkol Barlian – Jalan. SMP Carolus – Jalan. Pasar Barokoto II menuju Lapangan Merdeka
4. Jalan. Pasar Baru – Jalan Nala, Jalan Putri Gading Cempaka menuju Masjid At-Taqwa
5. Jalan Sedap Malam, Jalan Kebun Beler menuju simpang empat pantai Jalan. Batang Hari, Jalan Kampar, Jaan. Pembangunan menuju SMK Negeri 2 Jalan. Pariwisata, Jalan. Ciliwung, Jl. Serayu menuju Lapangan Sepak Bola Kemuning
6. Jl. Cimanuk, Jl. Kap. Tendean, Jalan P. Nata Dirja menuju Balai Buntar.  
(i). Jalan Ir. Rustandi menuju Lapangan Pagar Dewa.
7. Jalan Jembatan Kecil, Jalan Gunung Bungkok, Jalan Merapi, Jalan Danau menuju Lapangan Pesantren Pancasila.
8. Jalan Raya Betungan, Jalan Dua jalur Simpang Kandis menuju Terminal Betungan; dan
9. Jalan Irian, Jala. Halmahera Jala. Dnanau menuju Simpang Empat Nakau.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Karakteristik Informan

Dalam kaitannya dengan judul yang di ambil yaitu analisis penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu, peneliti menggali data dengan teknik *purposive sampling* yang melakukan wawancara pada beberapa informan penelitian. Dalam hal ini, informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 20 informan yaitu 10 informan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu dan 10 orang warga yang terkena dampak banjir di Kota Bengkulu.

Adapun informan yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu ialah sebagai berikut :

Tabel 5.1.1  
Daftar Informan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu

No	Nama Informan	Jabatan
1	Ir. Mulyani	Kepala Pelaksana
2	Nurhadi SH	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3	Drs. M Nasir	Kabid Kedaruratan dan Logistik
4	Tabri SP	Kabid Rehabilitas dan Rekontruksi
5	Armen Nofiar	Kasubbid Pencegahan
6	Firmansyah	Kasubbid Kesiapsiagaan
7	Lista Ferlia	Kasubbid Kedaruratan

8	Iskandar	Kasubbid Rehabilitasi
9	Agusman Yulian	Kasubbid Rekontruksi
10	Deri Antoni	Satgas BPBD

Informan diatas dipilih karena informan-informn di atas menangani mengenai masalah yang diteliti sehingga mereka memahami apa yang pokok permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini, informan yang telah dipilih peneliti unuk memperoleh data dan menggali masalah melalui waawancara merupakan informan yang menangani permasalahan yang di ambil peneliti dalam penelitian.

Selain dari informan diatas, peneliti juga mewawancarai beberapa warga yang berada di wilayah rawan banjir dan terkena dampak banjir di Kota Bengkulu.

Adapun nama-nama informan tersebut ialah sebagai berikut :

Tabel 5.1.2  
Daftar Informan warga yang berada di wilayah rawan banjir dan terkena dampak banjir di Kota Bengkulu

No	Nama (Inisial)	L/P	Tempat Tinggal
1	A.R	P	Suka Merindu
2	W.R	L	Suka Merindu
3	P.H	L	Tanjung Jaya
4	W.M	P	Tanjung Jaya
5	H.E	L	Pagar Dewa
6	P.N	P	Pagar Dewa
7	S.M	L	Lempuing

8	K.K	L	Lempuing
9	L.M	P	Rawa Makmur
10	P.Z	L	Rawa Makmur

Sesuai dengan teknik purposive sampling yang digunakan peneliti maka peneliti memilih informan dari warga yang berada di wilayah rawan banjir dan terkena dampak banjir di Kota Bengkulu karena informan dianggap mengetahui persoalan yang diteliti oleh peneliti dan informan yang diambil tersebut berkaitan langsung dengan persoalan yang diteliti.

## 5.2 Hasil Penelitian

Bencana Banjir merupakan Suatu Bencana yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan di wilayah pemukiman yang berdampak pada Kelangsungan Hidup Warga. Maka dari itu diperlukannya penanggulangan bencana banjir sehingga hal-hal seperti itu dapat diminimalisir. Dalam hal ini, penanggulangan bencana banjir sangat diperlukan untuk dapat mencegah hal-hal yang dapat merusak dan mengganggu kenyamanan yang berdampak buruk pada warga yang terkena banjir. Adapun penanggulangan bencana banjir tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah. Wewenang untuk melaksanakan tugas mengenai penanggulangan bencana banjir yaitu ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu instansi yang melaksanakan penanggulangan bencana yang ada di Kota Bengkulu termasuk penanggulangan bencana banjir. Dalam hal ini, penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah tersebut ialah dengan melakukan pencegahan,



penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Penanggulangan bencana banjir dimaksudkan agar dapat meminimalisir kerusakan dan memberikan kenyamanan warga dalam bertempat tinggal. Dengan pentingnya penanggulangan tersebut peneliti meneliti mengenai Analisis Penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu. Untuk menganalisis tersebut, peneliti menggunakan empat aspek yaitu Pencegahan Bencana Banjir, Penanganan Darurat Bencana Banjir, Rehabilitasi bencana banjir, Rekonstruksi Bencana Banjir.

### **5.2.1 Pencegahan Bencana Banjir**

Bencana banjir yang terjadi di Kota Bengkulu dapat menyebabkan terjadi kebanjiran yang dapat merusak lingkungan yang dapat merugikan sebagian besar masyarakat yang berawal dari [erosi tanah](#) yang kemudian akan menyebabkan terjadinya kebanjiran. Namun masih banyak cara untuk pengendalian terjadinya banjir yang bisa dilakukan untuk menanggulangi terjadinya banjir di wilayah Kota Bengkulu. Pencegahan bencana banjir merupakan bentuk pengendalian bencana banjir agar dapat meminimalisir bencana banjir yang terjadi. Cara untuk mengatasi bencana banjir di Kota Bengkulu tersebut seperti dengan tidak membuang sampah sembarang tempat, bergotong royong untuk membersihkan sungai dan banyak cara lainnya. Adapun untuk melaksanakan pencegahan tersebut diperlukannya pemikiran dan kerjasama dalam bentuk tenaga dari semua pihak baik dari pemerintah Kota Bengkulu, masyarakat atau elemen lain di dalam kemasyarakatan agar pencegahan tersebut dapat berjalan optimal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melaksanakan wawancara bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana ditandai dengan pemantauan rutin dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan resiko bencana, pemetaan lokasi rawan bencana dan pelaksanaan sosialisasi.

Pelaksanaan pemantauan rutin dapat berdampak tercegahnya terjadi bencana banjir karena dengan adanya pemantauan ke lokasi rawan bencana dengan rutin sehingga dapat mengurangi resiko bencana banjir. Pemantauan yang dilakukan secara rutin dengan cara menjaga pos pemantauan oleh satgas BPBD dan dengan cara melakukan pengecekan ke kawasan rawan bencana. Seperti yang di ungkapkan oleh informan yang bernama Ir. Mulyani selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa

“kita telah melaksanakan proses pemantauan terhadap lokasi rawan bencana di wilayah Kota Bengkulu secara rutin sesuai dengan program yang telah kami canangkan setiap tahun dalam program pencegahan resiko bencana. Dalam hal ini kami selalu melakukan survey lapangan seperti dalam 1 bulan kami menjadwalkan 3 kali pemantauan di berbagai daerah rawan bencana.” (Wawancara, Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tersebut bahwa pencegahan resiko bencana dilakukan melalui pemantauan yang dilakukan oleh tim satgas yang di bentuk oleh Kepala BPBD berjumlah 30 orang yang di tugaskan di titik rawan bencana dengan menempati pos penjagaan di setiap pos rawan bencana dengan cara bergantian menjaga pos melalui pemantauan rutin yang dilakukan 3 kali dalam 1 bulan.

Dari data yang di ambil di BPBD Kota Bengkulu sewaktu penelitian bahwa dalam laporan capaian kinerja terdapat program yang telah di realisasikan pada tahun 2105 yaitu program Meningkatkan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana dalam kegiatan peningkatan pos pemantauan pantai dan petugas pemantau bencana yang dilakukan selama 12 bulan seperti melakukan pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC), membenahi sarana-prasarana pos jaga telah terlaksana dengan persentase 88,85% dengan anggaran rencana Rp. 469.870.000 serta realisasi Rp. 415.580.500. capaian kinerja tersebut telah mencapai target capaian kinerja yaitu 85% sehingga dari capaian tersebut, pelaksanaan kegiatan BPBD Kota Bengkulu telah terealisasi melebihi dari target .

Rencana kegiatan di tahun 2016 bahwa pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam yang dilaksanakan oleh Nurhadi SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan tersebut. Rencana kegiatan yang dijalankan di tahun 2016 tersebut dilaksanakan dalam 12 Bulan dengan jumlah anggaran Rp.273.600.000,- pelaksanaan program ini melibatkan pegawai dan satgas BPBD dalam melakukan pemantauan selama 12 bulan. Realisasi program kegiatan yang sedang berjalan ini telah dilakukan dalam bentuk survei oleh beberapa tim kelengkapan oleh pegawai BPBD dan pelaksanaan oprasi pemantauan oleh satgas BPBD sebulan 5 kali untuk memberikan laporan terhadap atasan.

Hal demikian juga disampaikan oleh informan yang bernama Armen Nofiar Selaku Kasubbid Pencegahan yang menyebutkan bahwa

“Pelaksanaan pencegahan telah kami laksanakan dengan cara melakukan pengecekan terhadap tim satgas yang berada di pos jaga di kawasan rawan bencana dan menerima laporan dari pos jaga di setiap kecamatan. Laporan rutin yang disampaikan dari pos jaga dilakukan sebulan 2 kali..” (Wawancara, Mei 2016)

Sesuai dengan pernyataan diatas bahwa pelaksanaan pencegahan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu telah dijalankan dengan cara pengecekan terhadap satgas yang menjaga di kawasan rawan bencana khususnya bencana banjir dan menerima laporan dari pos jaga mengenai kawasan rawan bencana sebanyak 3 kali dalam sebulan. Setelah mendapatkan laporan maka kantor BPBD melaksanakan survei untuk dilakukan pembenahan lokasi banjir tersebut seperti dengan cara membuat talup/pelapis tebing ataupun beronjong sehingga dengan demikian bisa di anggarkan dalam rencana kerja tahun kemudian untuk membenahi lokasi banjir tersebut.

Selain Armen Nofiar, ada juga beberapa pegawai yang mengungkapkan hal seperti itu. Keterangan yang disampaikan tersebut oleh informan yang bernama Iskandar bahwa” memang benar kami telah melaksanakan pemantauan itu secara rutin agar program kami mengena di masyarakat”. Di sampaikan oleh Agusman dan Tabri selalu pegawai BPBD ”iya, kami telah melaksanakan program kami dengan baik, lihat saja di LAKIP kegiatan kami tahun lalu”.

Ungkapan lain disampaikan oleh informan yang berinisial A.R selaku warga Suka Merindu yang terkena dampak bencana banjir di lingkungan Kota Bengkulu menyatakan bahwa.

“Untuk masalah pemantauan dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu belum terlihat apapun dari kami baik secara

langsung ke lokasi kami ini maupun dari pos jaga. Kita lihat di sini juga tidak ada pos jaganya mas. Kalau tidak ada pos jaga bagaimana mereka mau menjaga setiap waktu kawasan ini mas. Seharusnya dari pihak BPBD sangat perlu melakukan pemantauan rutin dengan cara pengecekan 5 kali dalam 1 bulan setidaknya agar mengurangi resiko rawan bencana. Hal seperti itulah yang sangat kami butuhkan untuk dapat mencegah banjir yang sering terjadi di lingkungan kami.”(Wawancara, Mei 2016)

Senada yang disampaikan oleh informan yang berinisial P.H selaku warga Tanjung Jaya yang terkena dampak bencana banjir di lingkungan Kota Bengkulu menyatakan bahwa.

“sebenarnya ya mas, dari BPBD belum melaksanakan pemantauan terhadap kawasan ini, seharusnya kan mereka mesti melakukan pemantauan secara rutin baik itu dengan cara membentuk pos jaga ataupun pemantauan langsung ke kawasan sebanyak 4 kali dalam sebulan. Hal ini sangat di perlukan untuk mengurangi resiko banjir di setiap kawasan bencana khususnya di lokasi ini dek.”(Wawancara, Mei 2016)

Hal ini juga disampaikan oleh informan berinisial PZ dan WM bahwa “kami belum melihat ada pemantauan yang dilakukan oleh BPBD mas, kalo mereka bilang ada berarti mereka harus mempertanggungjawabkan hal itu mas”. Dari hasil wawancara diatas maka dapat dilihat bahwapernyataan yang berbeda di sampaikan oleh informan dari BPBD Kota Bengkulu dan Warga yang terkena dampak banjir mengenai permasalahan pemantauan rutin yang dilaksanakan baik itu melalui pengecekan langsung dari pihak BPBD maupun pemantauan dari pendirian pos jaga di setiap kawasan rawan bencana.

Dalam pelaksanaan pencegahan penanggulangan bencana banjir diperlukannya peta rawan bencana agar mengetahui titik rawan bencana sehingga dapat dicegah dengan baik. Permasalahan yang sering terjadi menyangkut

pencegahan dalam hal pembuatan peta rawan bencana terkhususnya bencana banjir yaitu peta rawan bencana tersebut belum di buat oleh instansi terkait. Dalam hal ini, diperlukannya peta rawan bencana banjir di lingkungan Kota Bengkulu agar dapat mengetahui letak titik-titik rawan bencana banjir.

Dalam pelaksanaan pencegahan bencana banjir, seperti yang di ungkapkan oleh Nurhadi, SH selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan bahwa,

”Mengenai peta rawan bencana terkhususnya merupakan pokok permasalahan kita karena kita belum membuat peta rawan banjir itu sehingga kita belum dapat menentukan dimana titik-titik rawan bencana di lingkungan Kota Bengkulu ini. Peta rawan bencana itu yang telah membuatnya yaitu Kabupaten Rejang Lebong sedangkan kita masih mengusulkan hal tersebut.”(Wawancara, Mei 2016)

Ungkapan juga disampaikan oleh informan yang bernama Lista Ferlia selaku pegawai BPBD bahwa,

“emang benar mas kami belum mempunyai peta rawan bencana sehingga kami belum bisa berbuat apa-apa terlalu banyak untuk dapat mengurangi bencana sekaligus memberi informasi kepada masyarakat di Kota Bengkulu”.(Wawancara, Mei 2016)

Berdasarkan wawancara diatas didapat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu mengakui belum mempunyai peta rawan bencana sehingga BPBD belum mampu menentukan titik rawan bencana di lingkungan Kota Bengkulu dan belum dapat memberikan informasi rawan bencana kepada masyarakat Kota Bengkulu.

Hal yang diungkapkan oleh informan yang berinisial S.M selaku warga yang terkena dampak bencana banjir di lingkungan Kota Bengkulu menyatakan bahwa.

“kami belum mendapat informasi dari instansi BPBD dimana letak lokasi rawan bencana, mungkin dari situ terlihat bahwa instansi ini belum membuat peta rawan bencana khususnya banjir ini. BPBD ke depannya harus lebih tanggap, setidaknya dapat memberikan kami informasi sebelum bencana terjadi (peringatan dini). Seperti misalnya penyuluhan tentang bencana apa yang rawan di tempat tinggal kami atau petarawan bencana.”(Wawancara, Mei 2016)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh informan tersebut menyatakan bahwa peta rawan bencana khususnya banjir belum dibuat oleh BPBD Kota Bengkulu. Hal ini terlihat dari tidak adanya informasi yang diberikan oleh BPBD terhadap masyarakat Kota Bengkulu mengenai daerah rawan bencana Banjir. Sampai Saat ini BPBD Kota Bengkulu Belum Membuat Peta Rawan Bencana.

Selain itu juga, perlunya melaksanakan pelatihan dalam mempersiapkan diri ketika terjadi bencana banjir. Kesigapan tersebut belum dirasakan oleh masyarakat sekitar Bengkulu pada pelaksanaan pencegahan bencana banjir, seperti yang di ungkapkan oleh Firmansyah selaku Kasubbid Kesiapsiagaan dan Deri Antoni selaku Satgas BPBD bahwa,

”kami disini telah melaksanakan pelatihan kesigapan agar ketika ada bencana banjir masyarakat dan lebih tenang menghadapinya sehingga tidak timbul keresahan. Pelatihan evakuasi bencana ini diberikan kesemua kecamatan yang ada di Kota Bengkulu dan yang terpenting di kecamatan-kecamatan yang rawan terjadi bencana banjir. Dalam satu tahun kita melaksanakan pelatihan gabungan yang kita minta delegasi dari tiap kecamatan yang ada di Kota Bengkulu dan semua itu telah kami jalankan dengan baik.”(Wawancara, Mei 2016)

Dari wawancara di atas bahwa pelaksanaan pelatihan evakuasi bencana dalam mencegah dampak terjadinya banjir di Kota Bengkulu telah dilakukan oleh instansi BPBD Kota Bengkulu dengan melibatkan masyarakat dan diharapkan setelah di adakannya pelatihan tersebut masyarakat dapat lebih tenang ketika menghadapi bencana banjir tersebut. Pelatihan evakuasi bencana ini dilakukan oleh BPBD Kota Bengkulu dengan bantuan pihak Kepolisian dan TNI setempat yang dilaksanakan pada bulan september dengan mengundang delegasi perwakilan masyarakat di setiap kecamatan sebanyak dua puluh orang.

Rencana pada tahun 2016 dilakukan kegiatan pelatihan atau simulasi penanggulangan bencana dan kesejahteraan sosial yang dinaungi oleh BPBD yang di komandoi oleh bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yaitu dikomandoi oleh bapak Drs. M Nazir dengan kisaran anggaran Rp.469.520.000,-. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan sebagian masyarakat yang berlokasi di daerah rawan bencana khususnya bencana banjir. Pelaksanaannya pada tahun ini belum terealisasi karena perlu menyiapkan lokasi dan perlu kajian teknis dalam melaksanakan hal tersebut.

Hal lain disampaikan oleh informan yang berinisial L.M selaku warga Rawa Makmur yang terkena dampak bencana banjir di lingkungan Kota Bengkulu menyatakan bahwa.

“iya memang benar instansi BPBD Kota Bengkulu telah melaksanakan pelatihan. Akan tetapi yang saya tahu pelatihan yang di adakan itu sewaktu tahun 2014 kemarin tepatnya di lokasi pantai panjang. Pelatihan itu hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat saja dan itupun kurang efektif karena pelatihan yang dilakukan hanya sehari sehingga tidak berdampak apa-apa terhadap saya pribadi. Ketika tahun itu hanya sekitar 30 peserta yang melaksanakan kegiatan tersebut.”(Wawancara, Mei 2016)



Hal lebih lanjut disampaikan oleh informan yang berinisial H.E warga Pagar Dewa, K.K warga Lempuing dan P.N selaku warga Pagar Dewa yang terkena dampak bencana banjir di lingkungan Kota Bengkulu menyatakan bahwa,

“Saya pribadi belum pernah mengikuti pelatihan tersebut. Mungkin pelatihan tersebut dipilih atau di tunjuk dari orang-orang yang mampu menyebarkan informasi dan ilmu mengenai pelatihan tersebut kepada kami. Akan tetapi kami juga belum mendapatkan ilmu tersebut. Terakhir saya dengar pelatihan diadakan terakhir tahun 2014 sedangkan tahun 2015 dan tahun 2016 ini belum dilaksanakannya pelatihan-pelatihan seperti itu oleh instansi terkait.”(Wawancara, Mei 2016)

Hal lain yang didapat bahwa rencana kegiatan sosialisasi bencana alam dan tsunami di daerah pesisir pantai direncanakan pada tahun 2016 dengan anggaran 105.050.000,- yang dilaksanakan oleh BPBD dengan melibatkan masyarakat pesisir pantai di kawasan Pantai Bengkulu. Pada tahun 2015 lalu realisasi dari program Sosialisasi ini melalui kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bencana yang dilaksanakan pada bulan juni di Aula Pertemuan BPBD Kota Bengkulu dengan Narasumber berasal dari BNPB dan di ikuti oleh masyarakat kota Bengkulu yang di koordinir oleh camat-camat di Kota Bengkulu. Dalam sosialisasi ini menyebutkan bahwa alur bencana khususnya banjir dimulai dari mitigasi sampai rehabilitasi bencana. Hal ini telah mencapai target kerja yaitu mencapai 94,94% dengan target rencana anggaran Rp. 61.940.000,- dan realisasinya sebesar 58.805.500,-(Lakip BPBD 2015). Dalam realisasi tersebut dilaksanakan oleh Tabri selaku Pegawai BPBD terhadap masyarakat di Kota Bengkulu sehingga yang menjadi sasaran tujuan kegiatan ini ialah masyarakat Kota Bengkulu.

Hal ini disampaikan oleh informan berinisial W.R selaku warga terkena dampak banjir bahwa,

“pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD udah ada tapi belum dirasakan oleh masyarakat secara baik sehingga masyarakat sulit untuk menerapkannya, saran saya supaya memberikan sosialisasi dengan metode yang lain sehingga dapat mudah di cerna oleh masyarakat Kota Bengkulu”. (Wawancara, Mei 2016)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh masyarakat di atas diketahui bahwa pelatihan telah dilakukan oleh BPBD, akan tetapi pelatihan tersebut belum maksimal dan belum berkelanjutan. Selain dari itu pelatihan yang dilaksanakan tersebut hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat sehingga tidak diteruskan ke masyarakat yang terkena dampak banjir lainnya. Dan juga pelatihan yang dilakukan belum bersifat rutin terlihat dari tahun lalu dan tahun ini belum dilaksanakan oleh instansi terkait yaitu BPBD.

### **5.2.2 Penanganan Darurat Bencana Banjir**

Salah satu bentuk pelaksanaan penanggulangan bencana yaitu dengan penanganan darurat bencana. Penanganan darurat bencana dilakukan saat terjadinya bencana khususnya bencana banjir. Penanganan yang dilakukan dengan cara mitigasi dan mengevakuasi masyarakat dalam sebuah pemukiman yang sedang terkena bencana banjir tersebut. Penanganan yang dilaksanakan dengan cara mengevakuasi masyarakat dan juga mengevakuasi barang-barang yang berasal dari pemukiman untuk dapat diselamatkan dan ditempatkan di tempat yang aman. Pelaksanaan mitigasi saat terjadinya banjir biasanya dilakukan dengan menerjunkan perahu karet kewilayah pemukiman dan mengevakuasi korban

bencana banjir ke dalam posko yang di sediakan oleh pemerintah dan elemen masyarakat lainnya seperti PMI, BASARNAS dll.

Dalam penelitian yang dilakukan di BPBD Kota Bengkulu mengenai penanganan darurat bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Kota Bengkulu didapat bahwa pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir dilaksanakan oleh BPBD Kota Bengkulu. Penanganan darurat bencana banjir yang dilakukan dengan cara menerjunkan personil saat terjadinya bencana banjir. Selain itu instansi BPBD perlu menyiapkan peralatan serta sarana dan prasarana sebagai penunjang penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Kota Bengkulu. Seperti yang di ungkapkan oleh Drs. M Nasir selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik bahwa,

“Untuk lebih dekat dengan masyarakat maka kami membentuk posko penanggulangan darurat bencana ketika terjadinya bencana banjir di Kota Bengkulu. Posko ini saya bentuk agar masyarakat yang terkena bencana dapat segera tertolong. Posko itu saya lengkapi dengan beberapa peralatan dan logistik.” (Wawancara, Mei 2016)

Dari yang disampaikan di atas terlihat bahwa penanganan darurat bencana banjir yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Bengkulu salah satunya dengan membentuk posko darurat bencana yang telah dilengkapi oleh peralatan dan logistik. Posko yang kami buat tiga posko yaitu dua posko penginapan dan satu posko dapur umum contohnya di wilayah lempuing ketika terjadi banjir. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan mambagikan selimut, matras dan lain-lain oleh keluarga yang terkena banjir, selain ini dalam posko dapur umum BPBD

bergotong royong dengan PMI, BASARNAS dan pihak terkait lainnya memberikan makanan dan obat-obatan untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Hal ini juga di ungkapkan oleh Armen Nofiar selaku Kasubbid Pencegahan bahwa,

“Kami telah membentuk posko saat kejadian bencana dalam hal ini khususnya bencana banjir dan di lengkapi alat-alat penunjang untuk mengevakuasi warga seperti perahu karet, palbet, matras dan lain sebagainya”. (Wawancara, Mei 2016)

Selain itu disampaikan juga oleh Agusman dan Iskandar selaku pegawai BPBD Kota Bengkulu Bahwa” mas, Kalau posko bencana dan alat-alatnya kami telah siapkan di lokasi kejadian saat terjadinya bencana banjir sehingga masyarakat tidak perlu khawatir posko tidak ada. Alat yang kami pergunakan seperti matras, palbet, selimut, mobil dapur umum, perahu karet, jenset dan lain-lain”. (Wawancara, Mei 2016)

Hal lebih lanjut disampaikan oleh informan yang berinisial H.E selaku warga yang terkena dampak bencana banjir di lingkungan Kota Bengkulu menyatakan bahwa,

“ketika terjadi bencana banjir tim dari satgas BPBD memang memasang tenda posko bencana akan tetapi belum bisa menampung seluruh warga yang terkena banjir. untuk peralatan emang belum terlihat seperti contohnya pelampung atau jas hujan saja kami tidak mendapatkannya. Seharusnya dari BPBD lebih memperhatikan hal tersebut. Saya.”(Wawancara, Mei 2016)

Seperti ini disampaikan oleh S.M selaku warga Bengkulu yang lain”posko sudah ada mas, tapi alat-alat yang berada didalam atau luar posko belum lengkap mas, itu sangat disayangkan bagi kami semua. Selain itu informan P.H dan A.R menyampaikan”posko yang di buat hanya dapat menampung sebagian masyarakat mas jadi kami masih numpang di teras warga yang tidak terkena banjir”. Informan

lain berinisial P.N dan K.K juga mengatakan ”peralatan yang diberikan kepada kami masih kurang mas seperti conto kecil terpal dan selimut tidur yang dibagikan masih sedikit”.

Dari wawancara di atas dikatakan bahwa untuk peralatan yang disediakan dari BPBD Kota Bengkulu belum ada, hanya tenda posko yang mereka sediakan. Tenda posko tersebut belum bisa menampung seluruh warga terkena banjir.

Menurut data yang bersumber dari Laporan Capaian Kerja BPBD Kota Bengkulu tahun 2015 bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana telah berjalan. Hal ini terlihat dari persentase program peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan penanggulangan resiko bencana dalam kegiatan peningkatan fasilitas dan konsultasi rencana penanggulangan bencana yaitu sebesar 96,63% dengan anggaran rencana kegiatan sebesar Rp.26.150.000 dan realisasi sebesar Rp. 25.270.000. Dari data tersebut terlihat bahwa anggaran fasilitas untuk penanganan darurat telah terealisasi maka peralatan untuk penanganan penanggulangan darurat bencana dapat di lengkapi.

Menurut data yang bersumber dari BPBD Kota Bengkulu bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana telah berjalan. Hal ini terlihat dari persentase program peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan penanggulangan resiko bencana dalam kegiatan peningkatan kegiatan satgas penanggulangan bencana yaitu sebesar 99,93% dengan anggaran rencana kegiatan sebesar Rp.121.500.000 dan realisasi sebesar Rp. 121.410.000. Dari data tersebut terlihat bahwa pelaksanaan atau penanganan yang dilakukan oleh satgas penanggulangan

bencana sudah cukup baik terlihat dari persentase kegiatan yang dilakukan. Akan tetapi hal ini berbeda dengan yang dirasakan oleh masyarakat di Kota Bengkulu mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh satgas BPBD Kota Bengkulu.

Selain dari itu dalam rencana kegiatan 2016 ini terdapat kegiatan Peningkatan peralatan dan perlengkapan tanggap darurat sehingga dengan adanya peralatan tersebut hendaknya dapat memberikan dampak baik terhadap masyarakat di Kota Bengkulu

Penanganan darurat bencana banjir juga di lihat dari penanganan yang dilakukan personil BPBD. Hal lain disampaikan oleh informan yang berinisial W.R dan L.M selaku warga yang terkena dampak bencana banjir di lingkungan Kota Bengkulu menyatakan bahwa.

“keberadaan BPBD tidak pernah saya rasakan walaupun waktu itu rumah saya terkenah banjir sampai ke pinggang, namun yang membantu saya untuk evakuasi hanyalah masyarakat sekitar. Semuanya tidak pernah saya duga bahwa akan banjir seperti ini, seandainya BPBD memang ada tentunya akan memberikan peringatan dini kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Pagar Dewa agar kerugian dapat dikurangi/dicegah dengan cepat.” (Wawancara, Mei 2016)

Pernyataan yang disampaikan tersebut bahwa ketika terjadinya bencana banjir, belum ada penanganan yang serius dilakukan oleh instansi BPBD Kota Bengkulu. Penambahan jumlah personil dan kapasitas personil diperlukan untuk menangani masalah banjir tersebut.

Hal yang sama di ungkapkan oleh informan yang berinisial P.Z selaku warga yang terkena dampak bencana banjir di lingkungan Kota Bengkulu menyatakan bahwa,

“Saya belum merasakan keberadaan dari BPBD. Banjir selama 3 hari,namun saya tidak pernah menemukan ataupun bertemu dengan BPBD. Saya mewakili warga saya bahwa yangkami sangat butuhkan pada saat terjadi bencana adalah bentukperhatian dari aparaturnegara khususnya BPBD.”(Wawancara, Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh informan tersebut bahwa masyarakat belum mengetahui keberadaan instansi ataupun satgas BPBD Kota Bengkulu sewaktu terjadinya bencana banjir. Seringkali penanganan bencana banjir hanya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri seperti hanya menggunakan sapu untuk membersihkan banjir yang ada di dalam rumah.

instansi ini melaksanakan Peningkatan personil operasi yang telah terlaksana di tahun 2015 dengan persentase 93,19% dengan total anggaran rencana kegiatan sebesar Rp. 114.930.000 dan realisasi dari BPBD Kota Bengkulu sebesar Rp. 107.098.300. dari data yang terhimpun tersebut dengan peningkatan jumlah personil BPBD seharusnya bisa lebih menangani bencana banjir ketika terjadinya bencana tersebut, akan tetapi saat ini dirasakan masyarakat berbeda dengan sebagaimana mestinya.

Data yang bersumber dari BPBD Kota Bengkulu bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana telah berjalan. Hal ini terlihat dari persentase program peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan penanggulangan resiko bencana dalam kegiatan peningkatan kegiatan satgas penanggulangan bencana yaitu sebesar 99,93% dengananggaran rencana kegiatan sebesar Rp.121.500.000 dan realisasi

sebesar Rp. 121.410.000. Dari data tersebut terlihat bahwa pelaksanaan atau penanganan yang dilakukan oleh satgas penanggulangan bencana sudah cukup baik terlihat dari persentase kegiatan yang dilakukan. Akan tetapi hal ini berbeda dengan yang dirasakan oleh masyarakat di Kota Bengkulu mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh satgas BPBD Kota Bengkulu.

Sementara itu permasalahan lain yang sering muncul mengenai peralatan yang mendukung kinerja BPBD Kota Bengkulu dalam melaksanakan penanganan darurat bencana banjir itu sendiri. Dalam hal ini peralatan yang dimiliki oleh BPBD belum cukup untuk memberikan pertolongan maksimal kepada masyarakat. Seperti hal yang disampaikan oleh Lista Ferlia selaku Kasubbid Kedaruratanbahwa,

“Kami sudah punya perahu karet. Akan tetapi perahu karet yang kami miliki Cuma tiga buah dan yang 2 itu rusak dan yang satu baru dapat digunakan sehingga menghambat kami dalam melakukan pertolongan saat waktu terjadinya bencana. Itu merupakan hambatan kami.”(Wawancara, Mei 2016)

hal yang sama disampaikan oleh “Deri Antoni” selaku Satgas BPBD bahwa,

“kami hanya memiliki satu alat perahu karet yang bagus sehingga dengan itu kami kesulitan dalam menangani bencana yang terjadi di sebagian Kota Bengkulu ini. Apa lagi jikalau banjir yang terjadi bukan hanya di satu tempat saja itu membuat kami kualahan menanganinya. Hal tersebut membuat keterlambatan bagi kami dalam menandai bencana-bencana di Kota Bengkulu terkhususnya masalah banjir.”(Wawancara, Mei 2016)

hal yang sama disampaikan oleh “Tabri SP dan Firmansyah” selaku Pegawai BPBD bahwa,

“alat yang kami miliki tidak banyak sehingga menyulitkan kami dalam melaksanakan tugas kami. Ketika terjadi banjir di sebagian Kota Bengkulu kami masih sulit membagi waktu untuk membantu evakuasi masyarakat tersebut.”(Wawancara, Mei 2016)



Tabel 5.2.2  
Peralatan Penanggulangan Bencana BPBD Kota Bengkulu

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	Mobil Ranger	1 Unit	Baik
2	Mobil Ambulance	-	-
3	Motor Trail	2 Unit	Baik
4	Matras	2buah	Baik
5	Pelampung	15 buah	Baik
6	Velbet	5 buah	4 baik, 3 rusak
7	Perahu karet	3 unit	Baik
8	Water treatment	1 set	Baik
9	Genset	2 unit	Baik
10	Tenda keluarga	2 unit	1 baik, 1 rusak
11	Tenda pleton	2 unit	Baik
12	Tenda regu	3 unit	Baik
13	Mesin Pompa air	1 unit	Baik
14	Pelampung pompa air	2 unit	Baik
15	HT	1 unit	Baik
16	RIG	1 set	Baik

Sumber : BPBD Kota Bengkulu

Adapun data yang bersumber dari BPBD Kota Bengkulu bahwa perahu karet jumlah perahu karet yang dimiliki oleh BPBD Kota Bengkulu berjumlah 3 Unit yang masing-masing di dapat pada tahun 2011 dua Unit dan Tahun 2013 satu unit, 2 unit kondisi rusak (Terlampir). Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya penanganan bencana yang dilakukan oleh BPBD. Perlu adanya penambahan peralatan lagi oleh pihak BPBD agar pelaksanaan dapat lebih maksimal, seperti tenda posko tenda pengungsian dal lain-lain.

hal yang sama disampaikan oleh informan yang berinisial P.N dan W.M selaku Warga Kota Bengkulu BPBD bahwa,

“emang benar untuk alat yang dikeluarkan oleh BPBD untuk menanggulangi bencana masih minim. Saya sendiri melihat peralatan yang di keluarkannya tidak sesuai dengan bencana yang di tanggulangi sehingga mengakibatkan kesulitan oleh peersonil BPBD itu sendiri dalam menanggulangi bencana khususnya bencana banjir”. (Wawancara, Mei 2016)

Selain pernyataan yang disampaikan di atas, peneliti memiliki data rencana kerja yang dijalankan oleh BPBD tahun 2016 bahwa dalam rencana kerja tersebut berisikan tentang penanganan darurat bencana yang dilakukan dengan cara peningkatan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana yang bertujuan untuk penanganan Penanggulangan Korban Bencana Alam di Kota Bengkulu.

### **5.2.3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana banjir**

Bencana merupakan suatu kejadian yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian material dan kerusakan lingkungan. Salah satu bencana yang sering terjadi adalah bencana banjir yang timbul akibat faktor alam maupun faktor manusia. Ketika terjadinya bencana biasanya banyak kerugian yang timbul seperti dari perumahan dan alat-alat dapur rumah tangga yang terbawa oleh banjir yang datang tiba-tiba. Pasca terjadinya bencana banjir perlu dilakukannya rehabilitasi dan rekontruksi agar dapat menata kembali pemukiman dan aliran sungan sekaligus dapat mengurangi atau meminimalisir banjir yang akan datang.

Penanggulangan bencana banjir selain dapat di cegah dapat juga ditangani setelah terjadinya bencana banjir. Pelaksanaan penanganan bencana banjir dapat

dilakukan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal semacam ini dapat dilakukan setelah bencana banjir terjadi. Adapun berbagai permasalahan yang sering terjadi mengenai hal ini sering meresahkan masyarakat sehingga diharapkan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Bengkulu telah berjalan dengan baik akan tetapi masih banyak permasalahan yang sering terjadi seperti permasalahan koordinasi dan pemerataan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi

Seperti yang diungkapkan oleh informan yang bernama Ir. Mulyani selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa

“kita telah membuat beronjong bencana alam jadi digunakan untuk mengantisipasi terjadinya banjir kembali di tahun mendatang. Dengan adanya beronjong ini sehingga dapat meminimalisir banjir di Kota Bengkulu..” (Wawancara, Mei 2016)

hal yang sama disampaikan oleh “Nurhadi SH dan Firmansyah” selaku Pegawai BPBD bahwa,

“kami telah membangun beronjong di lokasi yang sering terjadi banjir sehingga air yang mengalir tidak menembus ke badan jalan dan pemukiman lagi karena tertahan oleh beronjong yang kita buat.” (Wawancara, Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tersebut bahwa rekonstruksi yang telah dilakukan BPBD sehingga dengan adanya beronjong tersebut dapat meminimalisir terjadinya bencana banjir dikalangan masyarakat kemudian hari.

Dari data yang di ambil di BPBD Kota Bengkulu sewaktu penelitian bahwa dalam laporan capaian kinerja terdapat program yang telah di realisasikan yaitu

program peningkatan rehabilitasi bangunan pasca bencana yang dilakukan selama 12 bulan telah berjalan. Kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut seperti pembuatan bronjong, pelapis tebing penahan air dengan persentase 98,35% dan anggaran rencana Rp. 129.000.000 serta realisasi Rp. 126.877.000. Hal tersebut terlihat bahwa dalam rehabilitasi dan rekonstruksi telah terlaksana dengan baik oleh instansi BPBD Kota Bengkulu

Hal demikian juga disampaikan oleh informan yang bernama Tabri,S.P Selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang menyebutkan bahwa

“penanggulangan dengan cara rehabilitasi dan rekontruksi telah kami laksanakan dengan cara mendirikan posko bencana di seriap kecamatan dan melakukan perehaban terhadap posko-posko yang telah ada di kecamatan itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk dapat menangani masyarakat yang terkena dampak dari bencana banjir.Pendirian bangunan tersebut disaksikan oleh camat di kecamatan itu sendiri.”(Wawancara, Mei 2016)

Sesuai dengan pernyataan diatas bahwa rehabilitasi dan rekontruksi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu telah dijalankan dengan baik dengan mendirikan berbagai posko penanggulangan bencana dan melakukan perehaban terhadap posko yang telah ada.

Ungkapan lain disampaikan oleh informan yang berinisial P.N selaku warga yang terkena dampak bencana banjir di lingkungan Kota Bengkulu menyatakan bahwa.

“Terkait masalah keberadaan posko penanggulangan bencana yang didirikan dimasing-masing kecamatan yang sudah berusia kurang lebih satu tahun dan sampai sekarang belum dirasakanmanfaatnya oleh masyarakat terkaitkeberadaannya.”(Wawancara, Mei 2016)

Senada yang disampaikan oleh informan yang berinisial P.Z, P.H dan S.M selaku warga yang terkena dampak bencana banjir di lingkungan Kota Bengkulu menyatakan bahwa.

“sebenarnya ya mas, belum terlihat rekonstruksi posko bencana alam di sini. Gak tau saya klo di daerah lain. Klo disini dirasa tidak ada posko tersebut. Bisa mas lihat sendiri mas survey sendiri di kecamatan ini. seharusnya kan mereka mesti melakukan sosialisasi agar kami mengetahui betul keberadaan posko tersebut.”(Wawancara, Mei 2016)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan rehabilitasi ataupun rekonstruksi belum merata. Pos jaga yang telah di buat akan tetapi belum terasa manfaatnya oleh masyarakat dan juga belum didirikan posko itu sendiri.seharusnya penanganan seperti ini dapat dilakukan secara merata dan teratur dari instansi BPBD Kota Bengkulu agar terlaksananya penanggulangan bencana banjir yang optimal.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi bencana banjir diperlukannya pekerjaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga bangunan tersebut yang telah berdiri dapat dirawat dengan baik dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kota Bengkulu.Permasalahan yang sering terjadi menyangkut rehabilitasi dan rekontruksi dalam bidang pembangunan seperti halnya dalam pembuatan tanggul dan pelapis tebing serta gorong-gorong untuk melancarkan aliran sungai itu sendiri.Dalam hal ini, diperlukannya pembangunan yang nyata di berbagai titik rawan bencana banjir.

Dalam rehabilitasi dan rekontruksi bencana banjir, seperti yang di ungkapkan oleh informan yang bernama Iskandar selaku Kasubbid rehabilitasi dan Lista Ferlia selaku Kasubid Kedaruratan bahwa,

”kita disini telah melakukan pembangunan gorong-gorong sungai untuk dapat melancarkan aliran air di sungai sehingga dengan adanya gorong-gorong dan tanggul tersebut dapat mengatasi banjir yang ada di Kota Bengkulu dan untuk gorong-gorong yang telah ada kita lakukan perehapan 2 tahun sekali seperti gorong-gorong yang ada di sungan rawa makmur telah kita perbaiki.”(Wawancara, Mei 2016)

Berdasarkan wawancara diatas didapat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu telah membuat gorong-gorong dan tanggul di wilayah titik rawan bencana banjir dan melaksanakan perehapan 2 tahun sekali untuk wilayah yang telah dilakukan rekontruksi sehingga banjir dapat di minimalisir.

Hal yang diungkapkan oleh informan yang berinisial W.M dan H.E selaku warga yang terkena dampak bencana banjir di lingkungan Kota Bengkulu menyatakan bahwa.

“itu mas, gorong-gorong yang ada di daerah Surabaya ini gorong-gorongnya telah lama tidak di perbaharui telah telah rusak sehingga air yang mengair seringkali meluap ke ruas jalan surabaya ini. Kami berharap agar pemerintah dapat melakukan rehabilitasi sesegera mungkin atau melakukan rekontruksi. BPBD ke depannya harus lebih tanggap, setidaknya dapat memberikan perehapan yang berkelanjutan di titik rawan bencana seperti di daerah kami ini dan juga di daerah lain yang sering terkena banjir seperti daerah rawamakmur itu mas.”(Wawancara, Mei 2016)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh informan tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi khususnya banjir belum terealisasi dengan baik oleh BPBD Kota Bengkulu. Hal ini terlihat dari tanggul dan gorong-

gorong yang dibuat oleh instansi BPBD Kota Bengkulu belum sepenuhnya dibuat di lokasi rawan dan juga belum ada rehabilitasi dilakukan untuk tanggul dan gorong-borong yang telah rusak sehingga mengakibatkan meluapnya banjir ke bibir jalan seperti di daerah Surabaya dan Rawamakmur serta daerah lainnya di Kota Bengkulu.

Selain itu juga, perlunya melaksanakan koordinasi ke pihak terkait dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Koordinasi tersebut belum berjalan dengan baik di buktikan dengan belum mengikutkan masyarakat dalam melakukan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana banjir, seperti yang di ungkapkan oleh informan yang bernama Agusman Yulian selaku Kasubbid Rekonstruksi dan Drs. M Nasir selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik bahwa,

”kami disini telah melaksanakan koordinasi ke pihak terkait dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana banjir di lingkup Kota Bengkulu. Koordinasi yang dilakukan berbagai bentuk seperti berbentuk laporan dari kecamatan terkait maupun pengaduan dari masyarakat. Hal ini sudah kami lakukan dan untuk pelaksanaan tahun ini sudah kami adakan survey lokasi tersebut sehingga dapat kita usulkan untuk dapat di rehabilitasi atau di rekonstruksi di tahun depan.”(Wawancara, Mei 2016)

Dari wawancara di atas dapat di analisis bahwa pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh instansi BPBD telah berjalan dan bentuk koordinasi tersebut berupa pengaduan dari masyarakat dan laporan dari pihak terkait sehingga dalam segi rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat berjalan dengan baik.

Hal lain disampaikan oleh informan yang berinisial K.K selaku warga yang terkena dampak bencana banjir di lingkungan Kota Bengkulu menyatakan bahwa.

“saya belum pernah mengetahui bahwa tim dari BPBD melakukan koordinasi kepada kami mengenai hal rehabilitasi dan rekontruksi masalah pembangunan gorong-gorong, tanggul ataupun hal lain seperti jembatan. Seharusnya pihak BPBD dapat berkoordinasi oleh kami melalui wakil2 kami disini. Semestinya instansi BPBD dan kami bisa melakukan seperti rapat pembangunan rekontruksi ataupun rehabilitasi.”(Wawancara, Mei 2016)

Hal lebih lanjut disampaikan oleh informan yang berinisial A.R dan W.R selaku warga yang terkena dampak bencana banjir di lingkungan Kota Bengkulu menyatakan bahwa,

“Saya pribadi belum pernah mengetahui bahwa dari pihak BPBD melaksanakan koordinasi dalam masalah penanganan perbaikan gorong-gorong atau tanggul di sekitar daerah sini. Semestinya BPBD mensosialisasikan terlebih dahulu kepada kami sehingga kami mengetahui dampak dari pembangunan tersebut. Siapa tau warga disini mau ikut membantu dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.”(Wawancara, Mei 2016)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh masyarakat di atas di ketahui bahwa koordinasi yang dijalankan oleh BPBD di Kota Bengkulu belum berjalan dengan baik dan belum terlihat oleh masyarakat. Koordinasi diperlukan untuk dapat mengetahui letak lokasi dimana pembangunan itu harus dilakukan baik dalam segi rehabilitasi maupun rekontruksi.

Dari hasil penelitian mengenai penanganan banjir melalui rehabilitasi dan rekontruksi yang dilaksanakan oleh instansi BPBD Kota Bengkulu di temukan berbagai kendala dalam pelaksanaan pencegahan bencana banjir. Permasalahan yang sering terjadi seperti . Koordinasi yang dijalankan antara pemerintah dan masyarakat belum berjalan dengan baik dan optimal guna menentukan titik rawan bencana, Masih banyak bangunan-bangunan yang lama belum di lakukan perehapan seperti tanggul dan gorong-gorong, Pelaksanaan rekostruksi dan



rehabilitasi belum merata. Ada beberapa titik belum di rehabilitasi atau di lakukan rekonstruksi.

### **5.3 Pembahasan**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu instansi yang melaksanakan penanggulangan bencana yang ada di Kota Bengkulu termasuk penanggulangan bencana banjir. Dalam hal ini, penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah tersebut ialah dengan melakukan pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Penanggulangan bencana banjir dimaksudkan agar dapat meminimalisir kerusakan dan memberikan kenyamanan warga dalam bertempat tinggal. Dengan pentingnya penanggulangan tersebut peneliti meneliti mengenai Analisis Penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu. Untuk menganalisis tersebut, peneliti menggunakan empat aspek yaitu Pencegahan Bencana Banjir, Penanganan Darurat Bencana Banjir, Rehabilitasi bencana banjir, Rekonstruksi Bencana Banjir.

Dari hasil penelitian mengenai pencegahan bencana banjir yang dilaksanakan oleh instansi BPBD Kota Bengkulu di temukan berbagai kendala dalam pelaksanaan pencegahan bencana banjir. Adapun dalam segi pemantauan rutin yang dilaksanakan oleh BPBD belum optimal hal ini terlihat belum adanya laporan pemantauan dalam segi administrasi juga belum adanya pos jaga serta laporan pemantauan dari satgas yang menjaga di kawasan bencana alam. Seharusnya di banyun pos jaga di tiap kecamatan guna untuk melakukan pemantauan rutin terhadap kawasan yang sering

terkena banjir. Indikator lain seperti halnya pelaksanaan pembuatan peta rawan bencana khususnya bencana banjir yang belum ada sehingga instansi BPBD belum dapat menyampaik[ai] informasi rawan bencana di kawasan Kota Bengkulu dan juga pelaksanaan pelatihan kesiapan dalam pencegahan dan penanganan bencana belum dirasakan seutuhnya oleh masyarakat di buktikan dengan pelatihan yang dilakukan tidak berkelanjutan serta pelatihan yang dilakukan belum merata didapatkan atau dirasakan oleh seluruh masyarakat di kawasan bencana banjir khususnya sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pencegahan yang dilakukan oleh BPBD Kota Bengkulu belum berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu perlunya diadakan sosialisasi dengan metode berbeda agar dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat di Kota Bengkulu.

Dari penanganan darurat bencana banjir dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penanganan darurat bencana telah berjalan akan tetapi belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat di Kota Bengkulu. Permasalahan yang sering terjadi seperti personil yang belum terlihat membantu masyarakat saat terjadi bencana banjir, hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam mengurangi resiko bencana banjir. Seharusnya dari instansi BPBD perlu menambahkan jumlah personil atau satgas serta melakukan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas personil. Selain dari itu, peralatan yang belum memadai, sarana dan prasarana sewaktu terjadinya banjir belum sepenuhnya ada seperti tenda yang masih kurang perahu karet banyak yang rusak serta peralatan lain yang belum ada sehingga menghambat jalannya penanganan bencana banjir di Kota Bengkulu.

Dari hasil penelitian mengenai penanganan banjir melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh instansi BPBD Kota Bengkulu di temukan berbagai kendala dalam pelaksanaan pencegahan bencana banjir. Permasalahan yang sering terjadi seperti Koordinasi yang dijalankan antara pemerintah dan masyarakat belum berjalan dengan baik dan optimal guna menentukan titik rawan bencana sehingga masih sulit untuk melakukan perhaban pasca bencana banjir, Masih banyak bangunan-bangunan yang lama belum di lakukan perhapan seperti tanggul dan gorong-gorong yang mengakibatkan jebolnya tanggul tersebut. Pelaksanaan rekostruksi dan rehabilitasi belum merata dan ada beberapa titik belum di rehabilitasi atau di lakukan rekonstruksi.

Tabel 5.3  
**Matrik Hasil Penelitian Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan  
 Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu**

NO	ASPEK PENELITIAN	Hasil Penelitian	PERMASALAHAN
1	Pencegahan Bencana Banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan terhadap kawasan bencana banjir terhadap 30 orang tim satgas bencana BPBD dan dilakukan pemantauan rutin 3 kali dalam 1 bulan oleh BPBD.</li> <li>- Pembuatan peta rawan bencana dengan pembuatan buku Peta Rawan Bencana.</li> <li>- Pelatihan kesiapan personil satgas BPBD Kota Bengkulu melalui pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRS) dilakukan 1 kali dalam 1 Tahun</li> <li>- Sosialisasi yang rutin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pelaksanaan pembuatan peta rawan bencana khususnya bencana banjir yang belum ada</li> <li>- pelaksanaan pemantauan yang dilaksanakan belum dilakukan secara rutin dan perlu dibangun posko penjagaan akar dapat mengawasi lokasi rawan bencana.</li> <li>- dalam pencegahan dan penanganan bencana belum dirasakan seutuhnya oleh masyarakat</li> <li>- Metode sosialisasi yang dijalankan mesti berubah sehingga dapat dipahami dan di terapkan.</li> </ul>
2	Penanganan Darurat Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pembentukan posko bencana banjir seperti tenda Dapur, Keluarga dan Tenda Umum untuk persitirahatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- personil yang belum terlalu turun membantu masyarakat saat terjadi bencana banjir,</li> </ul>

	Banjir	<p>saat evakuasi warga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penanganan darurat bencana banjir melalui satgas BPBD Kota Bengkulu yang terjun membantu warga yang terkena banjir dan di evakuasi ke posko bencana banjir</li> <li>- sarana dan prasarana serta peralatan yang digunakan dalam penanganan bencana banjir dengan cara menyediakan alat untuk tidur, kesehatan dan makanan serta alat lain seperti perahu karet, palbet dan lain-lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peralatan yang belum memadai seperti tenda yang masih kurang perahu karet banyak yang rusak</li> <li>- sarana dan prasarana sewaktu terjadinya banjir belum sepenuhnya ada</li> </ul>
--	--------	--	--

3	Rehabilitasi dan Rekontruksi bencana banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi dari BPBD kepada masyarakat di Kota Bengkulu</li> <li>- pelaksanaan rehabilitasi bangunan lama</li> <li>- pelaksanaanrekontruksi pada bangunan baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi yang dijalankan antara pemerintah dan masyarakat belum berjalan dengan baik dan optimal guna menentukan titik rawan bencana,</li> <li>- Masih banyak bangunan-bangunan yang lama belum di lakukan perehapan seperti tanggul dan gorong-gorong,</li> <li>- Pelaksanaan rekostruksi dan rehabilitasi belum merata.</li> </ul>
---	---	---	---

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasn yang telah dibahas di bab sebelumnya maka disimpulkan bahwa Penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kota Bengkulu belum berjalan dengan maksimal, masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut. Hal ini ditandai dengan Pencegahan Bencana Banjir, Penanganan Darurat Bencana Banjir, Rehabilitasi dan Rekontruksi bencana banjir masih banyak ditemukan permasalahan.

Pada aspek pencegahan bencana banjir tersebut masih ditemui permasalahan-permasalahanseperti pelaksanaan pembuatan peta rawan bencana khususnya bencana banjir yang belum ada, pelaksanaan pemantauan rutin yang belum tampak oleh masyarakat serta pelatihan kesigapan belum dirasakan masyarakat sehingga pencegahan dan penanganan bencana belum dirasakan seutuhnya oleh masyarakat. Perlunya penerapan metode sosialisasi yang lebih praktis sehingga masyarakat lebih mudah memahami.

Pada aspek penanganan darurat bencana banjir terlihat belum berjalan maksimal buktinya seperti personil yang belum terlalu turun membantu masyarakat saat terjadi bencana banjir, peralatan yang belum memadai seperti tenda yang masih kurang perahu karet banyak yang rusak, sarana dan prasarana sewaktu terjadinya banjir belum sepenuhnya ada.

Pada aspek rehabilitasi dan rekontruksi bencana banjirterlihat belum berjalan maksimal buktinya seperti koordinasi yang dijalankan antara pemerintah

dan masyarakat belum berjalan dengan baik dan optimal guna menentukan titik rawan bencana, masih banyak bangunan-bangunan yang lama belum dilakukan perehapan seperti tanggul dan gorong-gorong, pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi belum merata.

Jadi, Penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kota Bengkulu masih belum optimal bahkan hampir sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti member saran sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu perlu dilakukan pencegahan sebaik mungkin dengan cara pelaksanaan pembuatan peta rawan, sosialisasi yang maksimal
2. Harus ada personil yang mendukung pelaksanaan tugas serta peralatan yang memadai sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin.
3. Diperlukannya sarana dan prasarana agar dapat memberikan penanganan yang baik bagi korban bencana banjir
4. Harus ada koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menengani penanggulangan bencana banjir
5. Diperlukannya pemerataan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana baik dari segi pencegahan, kedaruratan ataupun rehabilitasi dan rekontruksi.



## DAFTAR PUSTAKA

### - **Buku**

- Alwi, Hasan, dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bakornas PB, 2006. *Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia*, Sat Bakornas PBP, Jakarta
- Deni Hidayati, 2005. *Panduan Siaga Berbasis Masyarakat*. LIPI Press, Jakarta.
- Faisal, 1990. *Strategi dan Operasional penanggulangan*. Penerbit Liberty, Jakarta.
- Gottschalk, Louis, 1986. *Mengerti Sejarah* (terjemahan Nugroho Notosusanto). UI-Press, Jakarta.
- Hariyanto, V Heru. 2001. *Motivasi dan Kesehatan Mental*. Jurnal Anemia, Surabaya.
- IDEP, 2007. *Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*. Edisi ke-2. Yayasan IDEP, Bali.
- Kartono, Kartini, 1980. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Ligal, S, 2008. *Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir*. Jurnal. *Dinamika Teknik Sipil* Volume 8. Jakarta.
- Malo, Manase dan Sri Trisnoningtias, 1999. *Metode Penelitian Masyarakat*. PAU-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.

- Miles, Mathew. B. & Huberman, 2001. *Qualitatif data Analysis* “terj. Rohendi Tjetjep, Analisis data Kualitatif. UI Pers, Jakarta.
- Mistra, 2007. *Antisipasi Rumah di Daerah Rawan Banjir*. Penebar Swadaya, Depok
- Moleong, Lexy J, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda karya, Bandung.
- Nurachman, 2007. *Pemulihan Trauma: Panduan Praktis Pemulihan Trauma Akibat Bencana Alam*. LPLSP3, Jakarta.
- Poerwandari, Kristi, 2005. *Psikologis Korban Pasca Bencana*. Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Kodoatie dan Sjarief, 2009. *Pengelolaan Bencana Terpadu*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Rahayu S, dkk, 2009. *Monitoring Air Di Daerah Aliran Sungai*. World Agroforestry Centre-Southeast Asia Regional Office. Indonesia, Bogor.
- Rohmat, Dede, 2009. *Tipikal Kuantitas Infiltrasi Menurut Karakteristik Lahan*. Bandung
- Saru, Arifin, 2008. *Studi model kebijakan mitigasi difabel korban bencana alam (studi kasus di kabupaten bentu)*. yogyakarta.
- Soeladi, 2006. *Manajemen Bencana Alam Tsunami*. Sekretariat Bakornas, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Rafia Aditama, Bandung.
- Sugiyono, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

....., 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.  
Alfabeta, Bandung.

Warto, 2010. Ujicoba Pola Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Alam  
pada Era Otonomi Daerah. Jakarta

- **Peraturan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang  
Penanggulangan Bencana.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan Badan Nasional  
Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 tahun 2010 tentang Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu

- **Internet**

Sudarwan, 2015. <http://news.okezone.com> , Koordinasi Penanganan Bencana  
yang Lemah. Akses Rabu, 11 Maret 2015.

Warjito, 2014. <http://bpbd.sukoharjokab.go.id>. Pengetahuan kebencana. Di akses  
tanggal 27 maret 2015.

Ongwihok, 2014. <http://news.metrotvnews.com>. Banjir, Belasan Rumah Di Kota  
Bengkulu Terendam. Di Akses tanggal 27 maret 2015.

Alamsyah, 2015. <http://www.antaraneews.com>. Akibat Bencana Banjir, Jalan Lintas Padang-Bengkulu Terhambat. Di Akses tanggal 23 juli 2015.

Darvinudin, 2014. <http://www.bpskotabengkulu.com>. Kondisi Geografis Kota Bengkulu. Di Akses tanggal 23 juli 2015.